

Panggung Politik dan Komunikasi Politik DPR RI Periode 1999-2004

Oleh: Lely Arrianie *

“Perang itu adalah politik berdarah dan politik itu adalah perang tak berdarah”
(Lely Arrianie)

Abstract

Most of House of Representative (DPR) members for 1999-2004 period are members since 1997. They experience reformation era when Soeharto was demoted and Abdurrahman Wahid (Gus Dur) resigned. It was a full of debate and violence period, wrapped by political messages. People hope reformation bring wind of change and politician in House of Representative make people get involved in political communication in House of Representative. Will politics change? Will the politician change too?

Key words: *Reformation, political communication*

Pendahuluan

Suasana reformasi telah memberikan dampak luar biasa terutama dalam kehidupan perpolitikan di tanah air. Kebungkaman yang terbelenggu selama tiga puluh dua tahun pemerintahan Orde Baru yang represif terlepas sudah, dari rakyat secara pribadi, kelompok kepentingan serta organisasi massa, pemuda mahasiswa maupun organisasi partai politik serta merta meneriakkan aspirasi, tuntutan dan agenda mereka ke panggung-panggung politik.

Asosiasi Parlemen Indonesia (API) melaporkan melalui Panduan Parlemen Indonesia bahwa, fenomena yang terlihat dari banyaknya tuntutan masyarakat yang diajukan ke dewan tidak terlepas dari langkah awal demokratisasi di Indonesia. Pemilu 1999 yang relatif dianggap sebagai pemilu paling *fair* sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia setelah pemilu 1955, dan dianggap telah melahirkan institusi pemerintahan paling *legitimate*.

Kehadiran politisi di panggung politik DPR RI juga di apresiasi dengan beragam argumen, sama seperti politisi lain yang manggung di panggung politik di daerah-daerah, wajah-wajah baru menghiasi teater politik dan melakonkan adegan politik dengan intensitas dan kegamangan politik yang beragam pula.

Sementara rakyat menanti hasil kerja mereka dengan antusiasme yang relatif besar, banyaknya aspirasi dan tingginya ekspektasi rakyat terhadap dewan merefleksikan peran lembaga legislatif sebagai dokter ahli yang harus dapat segera menyembuhkan berbagai macam penyakit pasien. Tingginya ekspektasi rakyat tentu harus diimbangi dengan kinerja anggota dewan yang perlu di dukung oleh para *experts*, yang terdiri atas para peneliti yang handal dalam bidangnya, karena anggota dewan bukanlah kumpulan orang yang serba tahu, yang selalu menguasai seluruh permasalahan rakyat, pemerintahan dan kenegaraan (Panduan Parlemen Indonesia, 2001:476).

Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian tergambar bahwa harapan rakyat terhadap anggota dewan ternyata telah diapresiasi secara berlebihan oleh kebanyakan anggota dewan. Tampilan politisi yang memukau tidak hanya diperlihatkan dengan simbol keanggotaan yang

* Dosen Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu, Doktor Ilmu Komunikasi UNPAD

serba memukau pula, bahkan Tamrin Amal Tamagola dari Universitas Indonesia pernah menyatakan bahwa: “Dengan berjalannya waktu politisi profesional membentuk suatu kelompok eksklusif mulai dari bahan pembicaraan yang diangkat, jenis kendaraan yang digunakan, jenis koran yang dibaca, membuat pernyataan tidak hanya politik tapi juga sosial budaya.” Jadi mereka bahkan bukan tidak dianggap menguasai seluruh permasalahan rakyat melainkan merekalah yang menganggap bahwa mereka memang lebih tahu semua permasalahan rakyat. Jadi ada sejenis perasaan narsisme yang dipagut oleh sebagian besar anggota dewan di berbagai pelosok tanah air.

Apa yang diungkapkan itu, muncul dari pengamatan panjang mengikuti perjalanan politisi sampai ke ranah pinggiran, tidak hanya di panggung depan tapi juga di panggung belakang. Bahkan peneliti menemukan panggung tengah sebagai sarana komunikasi politik politisi yang dipertukarkan dengan komunikator politik atau pelaku komunikasi politik lainnya.

Artikel ini adalah cuplikan hasil penelitian untuk disertasi penulis di Program Doktor Universitas Padjajaran tahun 2006. Untuk keperluan penelitian, nama-nama narasumber yang diwawancarai sengaja disamarkan dengan nama lain. Penelitian ini dilakukan sepanjang tahun 2003 sampai menjelang pergantian anggota dewan tahun 2004, dengan mengobservasi, mengamati dan sekaligus mewawancarai para politisi DPR dan politisi representasi parpol di parlemen yang terlibat langsung dalam penyampaian pesan-pesan politik di DPR RI, para profesional pemerintahan dan pengamat politik, para aktivis dan para jurnalis dan kelompok masyarakat yang sehari-hari terlibat dalam proses komunikasi politik di DPR RI secara langsung maupun tidak langsung.

Ternyata di DPR tidak ada satu model komunikasi politik teoritis apapun yang diterapkan. Komunikasi politik terjadi di DPR dan dilakukan oleh politisi masih sering didominasi oleh pemimpin, suasana komunikasi politik penuh intrik juga masih kentara dan sangat acak namun tidak mengikuti gaya komunikasi model Laswell yang populer dengan model liniernya. Melainkan lebih bersifat, interaksional dan transaksional, meski kadangkala juga menimbulkan persepsi yang keliru bagi peserta komunikasinya.

Meski menurut Novel Ali (1999:133) seharusnya; kajian aras praksis komunikasi politik itu seharusnya tidak lagi bermuara dari konsep ilmuwan politik Harold Laswell (1948), ketika ia bermaksud menjelaskan tindakan komunikasi. Kini komunikasi politik tidak lagi berkaitan dengan proses “*Who says what, what channel to whom with what effect*” (siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa), tetapi komunikasi politik itu lebih bermuara *sharing* (berbagi) simbol, gagasan, maksud, kepentingan dan sebagainya diantara sejumlah pihak. Itulah sebabnya Dan Nimmo (1989) menguraikan cakupan komunikasi politik terdiri atas unsur komunikator politik, pesan politik, media politik dan akibat-akibat komunikasi politik.

Menurut pengamatan peneliti, bisa saja model komunikasi politik itu dikembangkan dengan model yang lebih bermakna sehingga sesuai dengan fungsi yang melekat pada setiap politisi baik yang berangkat dari fungsi parpol yang mengusungnya yaitu; pendidikan politik, rekrutmen pemimpin dan agregasi kepentingan rakyat serta sejumlah hak yang melekat kepada mereka yang didukung secara kelembagaan dapat memberikan pembelajaran politik yang memadai kepada rakyat dengan melihat bukan pada siapa yang berbicara, tapi melihat simbol (*content*) apa yang dibicarakan.

Prakteknya yang ternyata terjadi dan berlaku di Indonesia memang masih berkisar dan bergulir di seputar prinsip yang sama dari waktu ke waktu. Novel Ali menamakannya dengan “ketimpangan komunikasi politik di Indonesia.” Disinilah dapat peneliti lihat bahwa dari

waktu ke waktu kita masih menyaksikan bagaimana komunikator politik, baik politisi, profesional maupun aktivis selalu mengidentikkan suatu pesan politik apakah akan dipersepsi sama apabila ia tahu siapa yang berbicara apa yang ia bicarakan dan dalam konteks apa. Karena itulah maka pada rapat yang dihadiri oleh pucuk pimpinan suatu lembaga atau departemen biasanya rapat atau sidang di DPR selalu akan lebih ramai dibandingkan dengan rapat yang digelar dan dihadiri oleh pimpinan setingkat direktur.

Meski demikian nampak juga bahwa efek yang timbul dalam komunikasi politik itu sedikit bergeser. Satu pesan bisa dipersepsi sama oleh pelaku komunikasi yang sama tapi juga bisa dipersepsikan berbeda meski oleh pelaku komunikasi yang sama. Sama disini maksudnya, kesamaan dalam kelompok partai misalnya. Sehingga muncul pula preposisi bahwa satu partai bisa beda pendapat dan beda partai bisa satu pendapat.

Pesan Politik dan Komunikasi Politik Politisi

Komunikasi politik seringkali menjadi tidak efektif dalam menyampaikan pesan politik ketika persepsi yang muncul tidak menjadi sama dengan apa yang dikehendaki oleh isi pesan itu. Makna politik bergeser, asumsi menjadi keliru dan bahkan komunikasi menjadi gagal. Deddy Mulyana (2004:1) mengemukakan: "Kegagalan berkomunikasi sering menimbulkan kesalah pahaman, kerugian bahkan malapetaka. Resiko tersebut tidak hanya tingkat individu, tetapi juga pada tingkat lembaga, komunitas dan bahkan negara."

Barangkali Deddy Mulyana benar, kerugian, kesalahpahaman dan malapetaka itu memang telah dirasakan dalam proses politik yang terjadi di Indonesia. Proses itu dikomunikasikan yang seharusnya memberi arti bagi sikap dan perilaku politik yang harus diperankan. Kenyataannya, proses itu justru menjadi sarana untuk melegitimasi sebuah perilaku politik yang justru negatif, oportunist bahkan mengarah kepada perilaku yang berciri kekerasan. Padahal menurut Mas'ood (1982:130), seharusnya: "Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik."

Sistem politik itu ada di DPR kemudian para komunikator politik menjalin komunikasi politik dalam berbagai bentuk. Masyarakat menyampaikan aspirasi, meminta berdialog dengan perwakilannya di DPR. Aktivis profesional dimintai pendapatnya tentang kasus dan pekerjaan yang harus dan tengah dilakukan oleh politisi di DPR. DPR sendiri melakukan rapat kerja, dengar pendapat melalui Pansus, fraksi, komisi maupun persidangan lain dengan profesional pemerintahan. Semua bermuara untuk menemukan arus komunikasi timbal balik bagi politisi, pemerintah dan rakyat secara signifikan yang terjadi adalah seperti yang dikemukakan oleh AM : "Politik Indonesia masih sangat diwarnai oleh kekerasan. Sebagian karena politik Indonesia masih tradisional, misalnya, alasan memilih dan mendukung partai masih komunal, primordial, kharismatik dan *patron klien*." Ini yang juga masih dapat diamati dalam komunikasi politik di Indonesia.

Selayaknyalah fungsi komunikasi politik itu sebetulnya dapat dijalankan oleh media massa, karena memang politisi tidak *isolated* dari media, meskipun saat ini media bukan satu-satunya alat yang memperteguh pertukaran pesan politik itu. Artinya pelaku komunikasi politik juga sangat menentukan apakah sebuah proses politik dapat berjalan sinkron dengan *ekspose* yang dilakukan media terhadap pemaknaan atas simbol yang dipertunjukkan oleh pelakunya sehingga tidak malah menimbulkan salah persepsi dalam menaknai simbol dan isi pesan komunikasi politik yang dipertukarkan.

Ketika orde baru berkuasa, sejumlah institusi politik yang seharusnya dalam proses komunikasi politik mengagregasikan kepentingan rakyat, ternyata diarahkan untuk mampu menempatkan diri dalam konteks interaksi diantara ketiga institusi utama yaitu : **Presiden, Angkatan bersenjata dan Birokrasi**. Bahkan menjadi pilar utama bagi penopang pilar-pilar politik yang ditancapkan oleh orde baru. Sejumlah hasil penelitian mendukung asumsi ini. Seperti yang dikatakan Karl D. Jackson (dalam Jackson dan Pye, 1978), yang menyebut Indonesia dengan *Bureaucratic Polity*, Ruth Mc Vey (1982) dengan *Beamtenstaat* (negara pejabat), Benedic Anderson menyebut Indonesia dengan *State-quo State*. Tetapi mungkin apa yang ditemukan Liddle sebagai gambaran Indonesia yang disebutnya *Modern Personal Rule*. Adalah paling pas untuk menggambarkan betapa Presiden menjadi satu-satunya penguasa ketika orde baru. Bahkan komunikasi politik sangat bersifat *top down*, satu arah dan harus diinterpretasikan dengan cara yang sesuai dengan keinginan Presiden. Meskipun menurut hasil penelitian ini juga sang presiden ternyata bermain cantik melalui *impression management* melalui mimik wajah yang selalu tersenyum *innocent*.

Kemudian wajah demokrasi menjadi amburadul sepanjang masa orde baru, proses rekrutmen politisi yang sebetulnya harus mengontrol Presiden ditentukan oleh Presiden juga, demikian juga yudikatif. Sehingga politisi terpilih bukan menjadi komunikator untuk membuka jalan bagi pelaku komunikasi politik lainnya untuk terlibat dalam proses politik. Sampai reformasi bergulir apakah wajah panggung politik berubah, ataukah orang yang menjalankan roda politik kita menjadi berubah.

Menurut sebagian politisi yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini wajah perpolitikan itu berubah, tetapi menurut sebagian besar informan yang aktivis dan profesional wajah itu tetap sama, tapi memang aktivitas politik ada yang berbeda. Semua perubahan itu diakui sebagai konsekuensi dari dibukanya kran reformasi dan ini dipersepsi sama oleh semua komunikator politik dalam penelitian ini.

Perubahan itu juga membawa konsekuensi terhadap perubahan pada tatanan, sistem dan struktur politik. Rakyat yang semula bungkam kemudian menggeliat. Sindrom reformasi bergulir menjadi *eforia* ke panggung politik jalanan dan institusi perwakilan. Sebagian besar politisi yang duduk di legislatif mulai menunjukkan kegarangannya dalam suasana *legislative heavy*. Banyak penguasa eksekutif yang gigit jari dengan fenomena ini, berhenti dari jabatannya atas supremasi legislatif.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama panggung politik berubah menjadi hingar bingar, demikian menarik untuk diamati. Baik para politisi, komunikator profesional dan para aktivis dengan lantang menghamburkan “uneg-uneg” politiknya, dengan tindakan, kata-kata, kemudian mereka sendiri yang mempersepsikan apakah kegarangan itu identik dengan kekerasan yang mengandung muatan politik.

Bagaimana sesungguhnya fenomena itu terjadi? Bagaimana kekerasan dalam komunikasi politik terjadi di wilayah depan ataukah wilayah belakang panggung politik, atau malah di wilayah tengah yang mereka ciptakan sebagai ruang kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang? Seperti gambaran yang dikemukakan sebelumnya Jika kekerasan itu terjadi di wilayah belakang maka akan nampak bentuk intrik-intrik politik sebelum maju ke wilayah depan. Kalaupun terjadi di wilayah depan, itu hanya karena penilaian orang saja karena memang penyampaian pesan itu kadangkala harus dilakukan dengan cara yang sedikit keras. Kekerasan dalam penyampaian pesan politik bisa juga terjadi di wilayah belakang apabila kekerasan itu dianggap sebagai sebuah istilah saja.

Komunikasi politik yang kemudian dilakukan oleh para politisi di DPR diwujudkan dalam berbagai bentuk, model yang nampaknya berbentuk *sharing* namun ternyata sebagian

tidak dimaknai sama oleh mereka yang terlibat dalam *sharing* itu. Kemudian diantara banyak model, model *top down* masih tetap berlaku hanya intensitasnya yang berkurang. Sehingga tidak menjadi sebuah keanehan lagi ketika orang yang berasal dari fraksi yang sama memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat fraksinya.

Untuk menjawab bagaimana terjadi kekerasan dalam penyampaian pesan-pesan politik di DPR RI baik yang dilakukan oleh politisi, profesional dan atau aktivis? Sebagian besar informan mengemukakan pandangan yang sama yakni terbukanya kran reformasi telah membuat siapapun merasa berhak untuk menggunakan haknya dalam berbicara dan berbuat untuk mewujudkan hak politiknya, bahkan cenderung menjadi *eforia* yang kebablasan.

Sebagian pelakunya dianggap belum memiliki kematangan dan cara berpikir yang signifikan dengan arus perubahan yang diinginkan. Sehingga tidak hanya di DPR RI, tetapi di DPRD propinsi Kabupaten dan Kotapun terjadi kekerasan dalam penyampaian pesan-pesan politik. Baik itu di panggung depan maupun panggung belakang. Tetapi tegasnya, kekerasan dalam penyampaian pesan-pesan politik di DPR RI itu ada dan bahkan dirasakan sendiri oleh para politisi.

Bagaimana para komunikator politik terutama politisi memaknai kekerasan yang terjadi dalam penyampaian pesan-pesan politik sebagian hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Kekerasan dalam komunikasi politik itu tidak hanya berupa kekerasan fisik tapi juga bisa berupa kekerasan psikologis. Ketika seseorang berbicara secara tidak proporsional dalam menilai lawan politiknya, menurut mereka itu juga merupakan kekerasan psikologis. Kekerasan yang terefleksikan dalam bentuk kekerasan fisik dan psikologis.

Apa yang terjadi di *front stage*, seringkali menggambarkan pula apa yang terjadi pada *back stagenya*, ada seorang tokoh politik yang menyampaikan sesuatu dengan begitu keras sehingga didefenisikan sebagai pesan kekerasan karena dia tidak berkomunikasi dengan cara yang berbeda dengan *back stage*, tetap bermusuhan dan tidak arif memahami perdebatan diantara mereka. Seperti kata ESF: “Di Indonesia sekarang sangat mudah menemukan komunikasi dengan muatan kekerasan, di mana mereka punya peluang terutama setelah reformasi, ada iklim baru yaitu kebebasan, mereka punya peluang untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan sehingga tidak ada lagi seleksi pesan.”

Ketika fenomena kekerasan dalam komunikasi politik mulai diperbincangkan, banyak yang kemudian mengkaitkannya dengan figur politisi instan yang direkrut secara dadakan. Tetapi asumsi semacam ini menjadi tidak terukur manakala partai politik yang melakukan proses rekrutmen terhadap politisi instan tadi ternyata menghasilkan kader yang cukup kredibel, lebih-lebih jika ternyata pelaku kekerasan dalam penyampaian pesan politik tadi bukan berasal dari partai yang diasumsikan merekrut politisi instan dimaksud.

Oleh sebab itu pula maka antara politisi yang satu dengan politisi yang lain bisa jadi memiliki motif yang berbeda, meskipun mereka melakukan kekerasan dalam mengkomunikasikan pesan politiknya dipanggung yang sama. Karena itu, ketika mengamati bagaimana latar belakang atau *background* kepartaian sang politisi turut memberi andil terhadap aktivitas kekerasan yang dilakukan politisi dalam penyampaian pesan politiknya. Ternyata hasilnya adalah bahwa tidak ada dikotomi apakah politisi dari partai A akan cenderung berperilaku seperti stigma yang melekat kepada partainya, melainkan tergantung para proses perekrutannya dan *track record* pribadinya.

Oleh karena itulah, berbicara tentang *background* politisi, baik kepartaian, individual, pendidikan dan sebagainya, mau tidak mau harus juga berbicara tentang proses rekrutmen yang menjadikan politisi tersebut menjadi politisi atau anggota DPR. Hal ini dimaksudkan

untuk melihat apakah dengan proses yang dilaluinya tersebut ia memang layak dan pantas memiliki peran itu.

Proses rekrutmen menjadi penting di perbincangkan dan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Politik LIPI yang dilakukan oleh Moch. Nurhasan (2001:13-14) di sejumlah daerah Sumatera barat (Sumbar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Selatan (Sul-sel). Menunjukkan bahwa Rekrutmen anggota legislatif akan mempengaruhi pula kualitasnya, apakah itu integritas, (Kemandirian, loyalitas, maupun tingkat otonominya), tanggungjawab serta akuntabilitasnya. Cara rekrutmen juga menunjukkan siapa yang paling mempunyai pengaruh dalam proses pemilihan calon-calon anggota legislatif serta berbagai motif kepentingan di dalamnya. Apakah partai politik apakah unsur dari luar, seperti masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah maupun kelompok kepentingan lainnya.

Apa yang dikemukakan diatas menjadi sinkron ketika kita membicarakan kemampuan politik aktor politik yang nampak dalam kapasitas kemampuan komunikasi politiknya. Mereka yang muncul secara *instan* tanpa diimbangi kapasitas individual dalam bentuk pengalaman berorganisasi termasuk pengalaman politik praktis sebelumnya nampaknya agak gamang melakukan argumentasi politiknya. Meskipun sebagian politisi dan juga komunikator politik lainnya beranggapan bahwa proses itu dapat dilakukan secara "*learning by doing*" tetap saja kemunculan mereka ke publik ternyata bisa menjadi ukuran peran politik mereka.

Panggung Politik di DPR RI 1999-2004

Panggung politik DPR RI periode 1999-2004 sebagian besar diisi oleh wajah-wajah politisi yang memang telah menduduki kursi DPR sejak tahun 1997. Kebanyakan dari mereka sempat merasakan hingar bingar panggung politik dalam suasana reformasi pasaca jatuhnya Soeharto serta masa-masa penuh ketegangan menjelang lengsernya Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu adalah dua masa yang ternyata direspon sebagai periode yang sarat perdebatan, sarat kekerasan dan semuanya dibungkus dengan pesan-pesan politik dan memberi isi pada setiap proses komunikasi politik yang dijalankan ketika itu.

Reformasi terus bergulir dan diharapkan membawa angin perubahan, para politisi yang manggung di DPR juga diharapkan dapat membuka jalan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam komunikasi politik di DPR. Lalu, apakah setelah itu wajah politik berubah? Apakah orang yang menjalankan roda politik kita juga menjadi berubah?

Menurut pengamatan peneliti ada banyak perubahan yang terjadi di panggung politik DPR RI periode keanggotaan 1999-2004 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adanya kesan bahwa anggota DPR hanya "5D" (datang, duduk, dengar, diam dan duit) tidak lagi nampak sepenuhnya benar. Ada gairah reformasi dan kebebasan berkomunikasi menyampaikan dan mempertukarkan pesan-pesan politik tanpa harus dibelenggu oleh rasa takut untuk di-*recall*, meskipun yang mampu berkomunikasi secara aktif nampaknya politisi yang itu-itu saja. Jadi masalahnya bukan terletak pada suasana panggung politik yang menakutkan, melainkan sangat tergantung kepada warna politisi yang siap atau tidak untuk manggung di DPR tadi.

Pada banyak kegiatan yang dapat peneliti amati di DPR, baik di panggung depan maupun di panggung belakang, suasana ramai selalu nampak di DPR. Entah itu karena banyaknya kegiatan yang digelar maupun suasana panggung belakang dan yang dipersepsi ada juga panggung tengah selalu ramai oleh kumpulan wartawan, tamu, masyarakat yang datang dari berbagai ragam individu, kelompok dan tentu saja dengan berbagai kepentingan.

Dari banyak pengakuan informan pelaku diperoleh di lapangan juga diakui bahwa kebanyakan politisi berusaha untuk mengekspresikan peran politik yang disandanginya dengan menikmati peran itu secara total: "Inilah kenikmatan berpolitik" ungkap Jahirin ketika ia ditanya bagaimana rasanya menjadi politisi di era reformasi. Jahirin juga mengungkapkan sebagai berikut:

Sampai dengan hari ini, posisi DPR 1999-2004 ini menurut saya jauh lebih baik. Saya dapat mengatakan ini karena saya punya pembandingan atas peran saya sendiri ketika saya menjadi anggota dewan tahun 1997-1999. Ketika itu saya sangat takut mengkomunikasikan pesan-pesan politik yang saya akui benar sekalipun. Hal itu menurut saya merupakan produk dari sistem politik yang berlaku ketika itu yang juga saya anggap sebagai bagian dari kekerasan psikologis yang terjadi di DPR (Wawancara **Jahirin**, politisi DPR RI Maret 2004).

Jahirin adalah salah satu dari sekian banyak politisi yang memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal di panggung politik selama masa keanggotaan yang dianggap mengalami suasana *legislative heavy*. Sayangnya, Hanya sedikit saja dari yang banyak itu dapat dan mampu mempresentasikan diri sebagai orang yang mewakili.

Banyaknya pertemuan politik yang tidak sepenuhnya dihadiri politisi atau dengan kata lain tidak hadirnya politisi dalam pertemuan yang digelar dalam membahas kepentingan rakyat banyak dengan pasangan komisi kerja mereka terutama dari pihak pemerintah, menyebabkan hilangnya kesempatan bagi mereka untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Padahal ketika itu gaji yang mereka terima tidaklah kecil. Hampir sepuluh kali lipat dari gaji pokok plus tunjangan jabatan fungsional seorang Guru Besar. Hal ini diakui oleh seorang politisi yang kemudian begitu merasa berdosa menjadi wakil rakyat. Sungkono lah politisi itu, ia mengatakan bahwa ia muak karena teman-temannya yang politisi korup semua serta masih banyaknya ketidak konsistenan terjadi di panggung DPR.

Kemarahan dan rasa muak Sungkono juga identik dengan kemarahan Sonata yang merupakan ketua fraksi di DPR tapi kemudian mengundurkan diri. Seperti yang diungkapkannya kepada peneliti dengan raut muka yang tampak sangat geram:

Saya terpilih dan masuk ke DPR dengan sombong bahwa saya akan masuk ke DPR dengan hati nurani, Tapi saat itu saya tahu bahwa saya masuk ke hutan balantara perpolitikan nasional yang amburadul, saya maju terus seperti benteng terluka, menabrak terus, maju terus. Tetapi selama menjadi anggota dewan ternyata kebanyakan semua berjalan tidak sesuai dengan hati nurani. Janji politik yang didengungkan bukan hanya tidak terlaksana, bahkan niat saja tidak ada untuk melaksanakannya juga tidak ada bagi sebagian besar anggota dewan (Wawancara **Sonata**, politisi DPR RI Maret 2004).

Sungkono dan Sonata mereguk kekecewaan karena tidak mampu menggilas keboborokan panggung politik meski dengan roda politik yang sesungguhnya sangat dominan ketika itu. Tetapi ada banyak politisi lain yang tetap saja maju melangkah dengan kemampuan politik yang terbatas sekalipun. Akhirnya mereka malah belajar dari pengalaman yang memang memberi mereka pembelajaran berpolitik secara langsung.

Di panggung politik DPR RI periode keanggotaan 1999-2004 menurut pengamatan peneliti terjadi kompetisi yang cukup menggairahkan, salah satu hal yang menyebabkan itu ada, yakni adanya kebebasan berkomunikasi dan setiap politisi dituntut untuk memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki. Jika dulu tidak ada interupsi, maka periode itu interupsi menjadi permainan yang menyenangkan dan sekaligus mengagetkan. Bahkan ketika Gus Dur mampu membuat beberapa politisi tersinggung karena ia menyatakan bahwa DPR seperti layaknya Taman Kanak-kanak (TK). Politisi marah mereka menginterupsi segera setelah Gus

Dur mengungkapkan kalimat itu. Tetapi sesuai dengan gayanya, Gus Dur tenang-tenang saja. Belakangan terbukti bahwa banyak komentar masyarakat yang kemudian menyamakan DPR tidak hanya sebagai TK tapi juga *play group* karena menganggap para politisi tidak lagi mencerminkan perilaku yang sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat yang terhormat.

Hingar bingar panggung politik itu makin semarak saja ketika beberapa politisi mementaskan pesan politik yang bermuatan kekerasan di wilayah atau panggung depan. Tidak hanya media yang heboh dan sibuk menampilkan adegan itu di halaman depan koran, majalah dan televisi menempatkannya sebagai fokus berita yang mereka tayangkan dengan meminta pengamat politik sebagai komentatornya. Tapi masyarakat memperbincangkan hal itu di lapo tuak, warung pojok, pasar bahkan restoran dan hotel mewah sekalipun. Mahasiswa menjadikan fenomena itu sebagai topik diskusi dengan mengundang nara sumber yang berkompeten baik dari pandangan politik, sosial bahkan psikologi. Semuanya memberi komentar atas apapun yang dipentaskan oleh politisi ketika itu dan menunggu detik-detik penyelesaian atas apa yang terjadi di panggung politik. Karena itulah seorang politisi yaitu Mamang yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Partai Bintang Reformasi, tetapi ketika penelitian ini dilakukan ia masih menjadi caleg untuk pemilu legislatif 2004 mengemukakan pandangannya:

Penegakan demokrasi dan penegakan keadilan seringkali sangat bertentangan dengan perilaku eksekutif dan legislatif pada saat ini, perilaku politik kita masih mencerminkan penindasan, KKN, bahkan ada upaya pemecahan yang lebih luas, dimana para politisi di DPR melakukan penyempitan budaya politik dari segi etika, moral dan sebagainya.

Masih sangat banyak yang harus dikaji di panggung politik DPR yang merupakan salah satu wadah untuk menggodok agar aspirasi masyarakat dapat menjadi sebuah keputusan politik yang berpihak pada kepentingan rakyat. Tetapi bahwa DPR diisi oleh berbagai ragam individu politisi dari berbagai ragam partai politik pula, adalah sebuah ironi lain yang masih perlu dipertanyakan tentang komitmen ideologis dan moral yang diusung atas nama partainya. Masih ada kekecewaan Gunadi akan kondisi di DPR meskipun suasana reformasi telah memberi peluang sangat banyak kepada para politisi untuk memaksimalkan kemampuan komunikasi politiknya:

Sekarang ini sudah sangat transparan sekali bahwa DPR adalah panggung sandiwara, para politisi sudah tidak memperjuangkan aspirasi rakyat melainkan aspirasi partai politiknya. Lihatlah partai-partai politik yang fanatik dan menuntut anggotanya untuk tunduk pada DPP partainya, sehingga sulit bagi seorang anggota DPR dari partai itu untuk mempunyai suara sendiri.

Barangkali apa yang diungkapkan Gunadi ada benarnya, tetapi dalam satu pengamatan di ruang rapat komisi peneliti masih menyaksikan adanya perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh seorang politisi dari partai tertentu yang memberikan suara berbeda dari kesepakatan yang dibangun di fraksinya, meskipun ia harus kalah pada akhirnya, toh ia telah menunjukkan komitmennya untuk berbeda suara meski hal itu dianggap fals bagi partainya.

Ini adalah sedikit banyak wajah panggung politik DPR RI 1999-2004, ada kebebasan bersuara, ada peluang untuk memaksimalkan peran dengan memaksimalkan kemampuan menyampaikan pesan-pesan politik bagi setiap politisi, ada kesempatan untuk menjadi populer dan berkuasa, ada dinamika yang memberi ruang dan waktu untuk menampilkan sosok mewakili, sehingga tinggal bagaimana politisi menangkap semua peluang kesempatan, ruang

dan waktu itu untuk mengasah, memperkuat dan menemukan jati diri sebagai politisi sejati. Bahkan Eldorado pun dengan bangga mengungkapkan; ” Kata orang dari 500 anggota DPR hanya beberapa orang saja yang sering dan berdialog ke bawah, dari yang sedikit itu adalah saya..... dari PKB ada 51 orang di DPR dan diantara yang 51 orang itu yang sering muncul adalah saya.”

Kebanggaan Eldorado cukup beralasan karena memang ia seringkali tampil dipanggung politik terutama wilayah depan meski kadangkala secara verbal ungkapan politisnya seringkali dianggap kasar dan tindakan serta bahasa tubuhnya juga dianggap mengandung muatan kekerasan. Ia kemudian belajar dari pengalaman. Terakhir jika diamati sedikit ternyata Eldorado telah berubah dalam penampilan politiknya ia seperti tengah memamerkan proses pembelajaran politik yang dianggapnya telah mampu mengubahnya menjadi dapat tersenyum dalam keadaan marah.

Inilah proses itu, warna politik di DPR RI dapat saja merubah politisi dari yang santun menjadi garang atau malah merubah seorang politisi dari yang garang menjadi seorang yang sangat piawai mengkomunikasikan pesan pesan politiknya. Entah karena kepiawaian itu pula beberapa politisi yang menjadi responden penelitian ini akhirnya berhasil kembali ke Senayan melalui prosesi pemilu legislatif 2004. Hal paling menarik untuk diamati selama masa keanggotaan DPR RI 1999-2004 adalah tidak dominannya “koor” setuju yang dinyanyikan politisi dalam setiap pengambilan keputusan politik meskipun sekali dua masih terlihat wajah terkantuk-kantuk ditutupi koran ketika rapat digelar, sebagian besar cukup aktif menggagas ide dan pemikiran meski kadang terasa tidak kontekstual.

Masalah lain adalah ketidak hadiran di sidang tertentu yang masih belum jelas alasan ketidakhadiran tersebut, meskipun mereka mengungkapkan bahwa ada tugas kunjungan kerja yang juga sama pentingnya untuk mereka lakukan seperti halnya sidang atau rapat di DPR yang harus mereka hadiri. Apapun masalahnya ketidak hadiran dalam rapat yang digelar paling tidak telah menghilangkan sebuah kesempatan untuk menampilkan ide dan pemikiran mereka melalui komunikasi politik. Padahal selalu harus diakui bahwa ada hubungan yang cukup signifikan antara komunikasi dan pencapaian sasaran politik seperti yang juga diakui oleh Greber (1981:23), bahwa, sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata, politisi berhasil meraih kekuasaan karena keberhasilannya berbicara secara persuasif kepada para pemilih dan kepada elit politik. Selain itu juga tergantung pada efektivitas komunikasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Saat menjalankan segiatan sehari-hari itu pula politisi melakukan manipulasi diri, aksi diri, transaksi berdasarkan persepektif komunikasi politik. Serta sekaligus menipulasi diri berdasarkan perspektif Goffman yang menurut pengamatan peneliti semua perspektif komunikasi politik ditambah manipulasi diri politisi sangat kental terjadi di wilayah depan panggung politik., baik pada rapat paripurna, rapat komisi, rapat dengar pendapat dan rapat gabungan. Dibandingkan dengan rapat yang digelar di fraksi, rapat di induk partai yang merupakan wilayah belakang dimana tiap politisi seringkali menampilkan sosok diri yang tidak sepenuhnya di idealisir . hal ini bisa jadi karena fraksi dan partai adalah terdiri dari mereka yang dianggap memiliki kepentingan sama, komitmen yang sama dan platform partai yang diusung secara sama pula, sehingga perspektif transaksi tidak menonjol mengemuka, apalagi manipulasi diri. Kasus permintaan kenaikan gaji menjelang masa bakti pertama di DPR mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pembenar dalam mendukung argumentasi itu.

Ketika politisi berada di wilayah tengah ternyata berdasarkan hasil pengamatan peneliti, semua kategori perspektif komunikasi politik itu terjadi bahkan manipulasi diri dapat terjadi

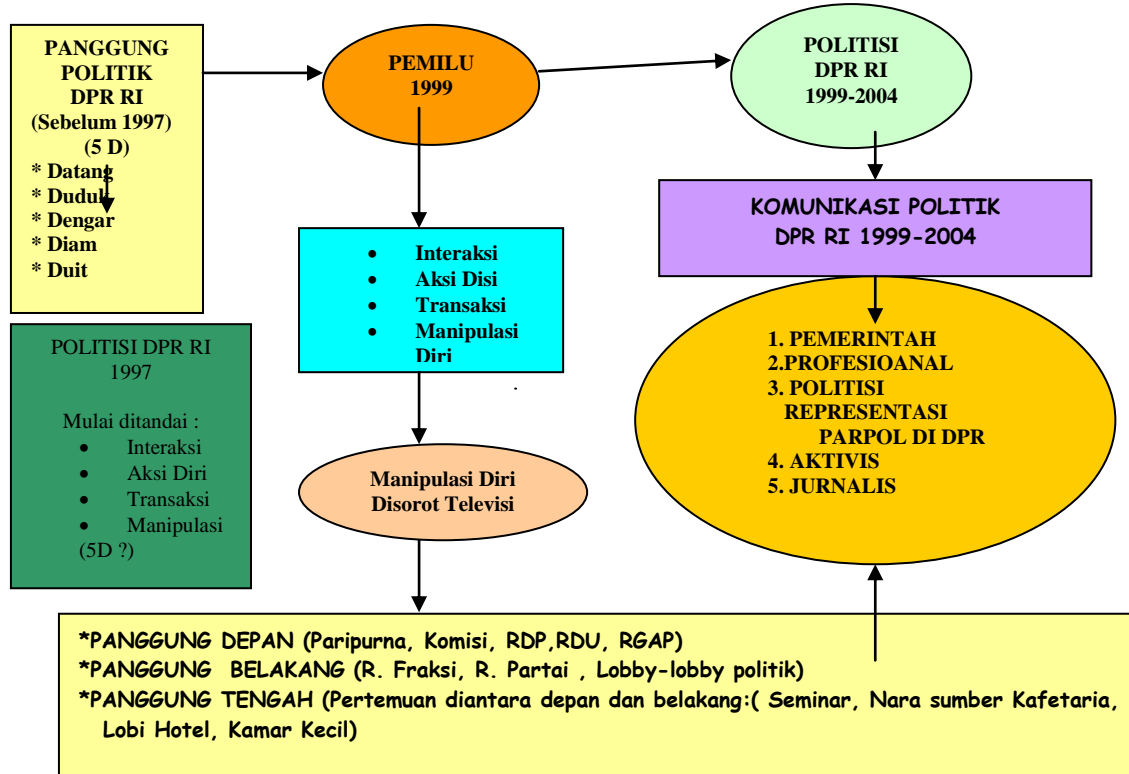
jauh lebih kental dibandingkan di wilayah depan meski kadang kadang manipulasi diri juga dihilangkan oleh politisi.

Adanya rutinitas pertemuan disela-sela sidang diruang khusus yang ada di kafetaria gedung Nusantara I yang sering peneliti lihat, bahwa ada beberapa politisi yang menjadikan ruangan itu dengan agenda pertemuan dengan orang-orang yang bukan berasal politisi, mereka berjas dan berdasi, menenteng koper dan tas dengan perlente, menjadikan peneliti penasaran. Pada satu sesi waktu yang peneliti miliki ketika berada di sekitar itu ternyata peneliti berhasil mengajak bicara salah seorang yang ternyata seorang pengusaha dan baru saja mengadakan pertemuan dengan seorang politisi yang berasal dari partai tertentu.” Saya menemui politisi tersebut untuk menggoalkan sebuah proyek besar,” ungkapnya.

Bahkan ketika peneliti sekali waktu berada di ruangan kerja politisi sambil menunggu waktu wawancara, peneliti juga sering juga sama-sama berada di ruang tunggu ruang kerja politisi dengan beberapa pengusaha yang ingin menghadap politisi di DPR tersebut. Ini mungkin tema menarik yang bisa saja dilakukan penelitian dengan lebih mendalam melalui variabel yang berbeda pula. Bahwa panggung politik DPR RI tidak hanya dihiasi oleh politisi yang melakukan komunikasi politik tetapi juga oleh komponen lain yang juga merupakan pelaku komunikasi politik yang mempertukarkan pesan-pesan politiknya di DPR RI. Yaitu politisi DPR RI hasil pemilu 1999, politisi representasi parpol di parlemen, pemerintah, profesional, jurnalis dan kelompok masyarakat lainnya.

Bagaimana kelompok yang panggung di DPR melakukan komunikasi politik. Bagaimana kepentingan pribadi dan kelompok yang mungkin mereka manipulasi sedemikian rupa dan membungkusnya dengan nama idealisme dan kepentingan rakyat. Inilah wajah panggung politik DPR RI 1999-2004:

Gambar 14. Panggung Politik DPR RI 1999-2004



Sumber : Hasil Penelitian 2003-2004

Pada penyajian data terdahulu panggung politik DPR RI terasa lebih semarak, hingar bingar dan memiliki dinamika setelah reformasi. Gerombolan massa yang menyerbu ke gedung rakyat dan menaiki kubah gedung utama menjelang lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan tentu tidak dapat dilupakan begitu saja oleh seluruh rakyat Indonesia. Sangat terasa bahwa rakyatlah yang saat itu menjadi pemilik gedung itu.

Suasana reformasi pula yang kemudian menjadikan gedung itu sebagai pusat segala aktivitas politik menjadi lebih terbuka, pesan-pesan politik mengalir dan secara bergilir, beruntun menyeruak disampaikan oleh individu, kelompok dan berbagai lapisan masyarakat yang merasa bahwa aspirasi mereka akan didengar langsung jika disuarakan ke pusat pengambilan keputusan politik tersebut. Politisipun bak selebriti menjadi pusat perhatian, sepak terjangnya dihitung, diamati dan bahkan dikritik. Tapi mereka tetap berjalan sebagai politisi yang merasa bahwa mereka mempunyai posisi tawar yang jauh melebihi kapasitas individual mereka sendiri karena lembaga telah menakarnya.

Mereka juga mengapresiasi hak mereka di wilayah depan, wilayah belakang bahkan menciptakan wilayah tengah dengan hitungan politik. Komunikasi politik mereka berjalan terus di tiga ranah tadi lengkap dengan segala atribut dan komitmen yang juga sulit ditakar, individu atautkah rakyat yang mereka wakili? yang jelas mereka terus berkomunikasi dengan interaksi, dengan aksi diri, mereka juga bertransaksi dan tentu saja melakukan manipulasi diri.

Berdasarkan hal itulah, maka kiranya perlu juga dipaparkan sejauh mana komunikasi politik telah memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran politik politisi, bagaimana ia mengkomunikasikan peran dan pesan itu di panggung politik akan diuraikan dalam bahasan berikut.

Komunikasi Politik Politisi di Panggung Politik DPR RI 1999-2004

Adanya temuan penelitian yang menyatakan bahwa satu fraksi bisa berbeda pendapat dan beda fraksi bisa satu pendapat yang dapat dilihat dari peristiwa bagaimana Mukrin dan Arya tentang kesepakatan untuk menentukan mekanisme keputusan fraksi serta kesamaan pandangan politisi yang berasal dari fraksi berbeda tentang RUU pendidikan maupun pertentangan anggota fraksi yang sama tentang RUU yang menyangkut tentang agama

Nampaknya, tidak ada ruang politik yang sepi dari kompromi sebagai hasil akhir dari politik yang dikomunikasikan, meski pada awalnya dipertentangkan namun pada akhirnya dipertemukan dalam sebuah kepentingan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politiklah yang membangun semua proses pertukaran pesan politik di DPR dan merangkum mereka yang berasal dari fraksi manapun. Komunikasi jelas adalah suatu proses, selalu ada celah untuk memandang komunikasi sebagai suatu proses. "Proses jelas bukanlah fenomena yang ditandai dengan kausalitas." (dalam Mulyana, 2001:51).

Ketika melihat proses itu, dalam suatu rapat yang dihadiri oleh beberapa fraksi ketika membahas RUU Agama misalnya dan RUU Pendidikan, maka fraksi Golkar bisa satu pendapat dengan PDIP atau bisa jadi satu orang dari fraksi yang sama berbeda pendapat dengan fraksinya semisal Mukrin yang kemudian berseteru dengan rekan sefraksinya karena sejak awal digagas di panggung belakang memang telah terjadi pertentangan pendapat diantara ia dan rekan sefraksinya. Semuanya berproses di panggung belakang dan mengalir ke panggung depan. Jadi meskipun Goffman mengatakan adanya "tim", ternyata di panggung politik tidak pernah ada "tim" yang ada adalah kepentingan individu yang terbangun atas dasar kepentingan individu pula.

Hasil penelitian ini memperkaya apa yang diketengahkan Goffman bahwa seharusnya kesan “akur” di panggung belakang, harus terbangun sampai ke panggung depan. Peneliti berpendapat bahwa “**di panggung politik konsep panggung depan dan panggung belakang menjadi kacau**”. Konflik seharusnya hanya terjadi di panggung belakang. Sama seperti yang pernah diungkapkan Arief bahwa “Seharusnya para politisi boleh mati-matian memperjuangkan kepentingan rakyat di fraksi dan komisi karena ketika keputusan akhir di paripurna tatib menggariskan tidak ada interupsi.”

Gambaran proses komunikasi politik semacam ini menarik untuk diketengahkan manakala secara teoritis telah digariskan oleh Greber (1981:23), bahwa, ketika kita menjelaskan bahasa politik (bahasa yang digunakan dalam konteks politik) dan apa yang membuat bahasa verbal maupun nonverbal menjadi politis bukanlah karena bentuk atau kosakatanya, melainkan karena substansi informasi yang dihadirkan, *setting* di mana informasi disebarkan maupun karena fungsi yang dijalankan.

Maka setiap penyampaian pesan oleh politisi yang bukan menyangkut politik sekalipun, ternyata adalah komunikasi politik namanya. Mengapa, karena *setting* dimana informasi itu disebarkan adalah di lembaga politik dan fungsi yang dijalankan adalah oleh mereka sebagai politisi. Fungsi itulah yang dimainkan oleh politisi ketika secara sempit politisi melakukan proses pertukaran pesan baik dalam bentuk lambang, kata-kata tertulis maupun yang terucapkan atau bahkan dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu atau ketika secara luas mereka menyampaikan pesan yang bermuatan info politik kepada sejumlah sumber. Ketika itulah komunikasi politik sesungguhnya telah digelar dalam pementasan peran politisi.

Memahami gerak dan dinamika politisi yang mengkomunikasikan pesan politiknya tidak hanya di panggung depan seperti di rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan, rapat dengar pendapat dan di panggung belakang seperti di rapat fraksi dan rapat lain yang di gelar di induk partainya, ternyata politisi melakukan komunikasi politik di wilayah tengah. Ini juga hasil temuan menarik yang tentu saja menjadikan wilayah panggung pementasan tidak hanya depan dan belakang seperti yang diungkapkan dalam teori dramaturgis Goffman. Tetapi panggung politik DPR terdapat wilayah tengah yang dapat membuat politisi mengkomunikasikan pesan politiknya semata-mata berkaitan dengan substansi informasi yang dihadirkan. Wilayah itu meliputi bisa berada di kafetaria, lobi hotel, ruang seminar, loka karya, teras gedung, ketika mereka menjadi nara sumber dalam siaran *live*, rumah dan bahkan kamar kecil.

Jika dalam teorinya Goffman mengatakan wilayah depan adalah sesuatu yang berbeda dengan wilayah belakang maka temuan penelitian ini membuktikan bahwa pada panggung politik di DPR Sesuatu yang terjadi di panggung belakang bisa muncul di panggung depan tetapi bisa juga tidak muncul dipanggung depan. Alhasil, berbeda dengan Goffman bahwa apa yang disusun sebagai skenario di panggung belakang itulah yang harus dimunculkan dipanggung depan, sedangkan panggung belakang adalah merupakan wilayah yang sama sekali tidak boleh terjamah oleh mereka yang tidak terlibat dalam pementasan. Karena itu maka sekali lagi peneliti nyatakan bahwa konsepsi tentang panggung seperti yang dinyatakan Goffman tidak sepenuhnya berlaku di panggung politik dan menjadi kacau. Masyarakat menyaksikan panggung depan, tetapi panggung tengah dan belakang tersajikan kepublik juga secara transparan.

Inilah esensi perbedaan itu, panggung politik memiliki warna yang berbeda dari panggung drama atau teater yang memang menjadi cikal bakal teori Goffman. Sesuatu yang digagas sebagai skenario fraksi di panggung belakang bisa jadi tidak muncul di panggung

depan, tetapi deal-deal politik di panggung tengah kemudian menjadikan arena panggung tengah sebagai sebuah wacana lain yang membangun komitmen kompromistis diantara pertemuan dua skenario tadi. Maka kemudian politik menjadi pertemuan dua kepentingan dan bisa jadi perbedaan dua kepentingan.

Sebagai komunikator politik, politisi memainkan peran politiknya dan ternyata, di panggung politik DPR RI bukan hanya politisi yang menjadi komunikator politik melainkan mereka yang datang ke DPR meski hanya sebagai rakyat biasa tetapi berkomunikasi secara individu maupun kelompok dengan wakilnya di DPR dan ketika para jurnalis mengungkapkan sejumlah pertanyaan politis kepada para politisi, maka mereka semua telah bertindak dan menjadi komunikator politik.

Dengan demikian, apa yang diungkapkan Laswell seperti yang dikutip Nimmo (1993:75), bahwa komunikator politik itu terdiri dari politikus, profesional dan aktivis saja juga menjadi pertanyaan. Konteks komunikator politik yang diungkapkan Nimmo adalah ketika komunikasi politik itu masih didefinisikan sebagai sebuah proses yang bersifat linier, sementara komunikasi politik itu kini tidak lagi linier melainkan bisa sirkuler dan konvergen. Bahkan di DPR komunikasi politik itu sangat bersifat humanistik, interaksional dan transaksional.

Komunikasi politik yang digelar di DPR sesungguhnya dapat dikaji berdasarkan tiga perspektif (Nimmo, 1993:18), yaitu, “perspektif aksi diri, perspektif interaksi dan perspektif transaksi.” Selain itu komunikasi politik di DPR juga dapat dilihat dengan bagaimana para politisi menampilkan model komunikasi politik yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang. Jika mengamati proses penyampaian pesan politik yang dilakukan oleh politisi di DPR, ketika mereka menginterpretasikan perilakunya melalui faktor-faktor internalnya, baik berupa motif, dorongan, sikap, rangsangan dan kapasitas lainnya, hampir semua politisi memaknai komunikasi politiknya melalui aksi diri yang positif, mengkaitkannya dengan idealisme dan fungsi keterwakilannya serta peran keterwakilan yang seolah-oleh dilakonkannya tanpa pamrih, tanpa motif mengejar popularitas dan kekuasaan.

Ironisnya ada fenomena bahwa sebagian besar politisi seperti telah tercerabut dari komunitasnya, menjauh dari konstituennya, mungkin bisa menjadi rujukan untuk menyatakan bahwa hanya sebagian kecil saja perspektif aksi diri positif itu melekat pada politisi, bahkan ketika perspektif interaksi kita gunakan untuk melihat komunikasi politik politisi di DPR dalam bentuk kelakuan yang menyeimbangkan hubungan sebab akibat, dengan kekuatan yang menggambarkan kedudukan secara ekonomi, peran sosial, tuntutan kelompok, ketentuan larangan budaya, kebiasaan dan hukum, maka dapat pula diamati bahwa beralihnya mereka dari warung pojok ke restoran mewah, dari dokar ke mobil mewah dari losmen ke hotel berbintang, menjadi sebuah fenomena lain betapa mereka mengalami “gegar budaya” pula tentang kapasitas dan kapabilitas mereka dalam memainkan peran untuk mengkomunikasikan pesan politik yang harus mereka perjuangkan, tidak hanya untuk pribadi dan kelompok melainkan untuk konstituen yang telah memilihnya serta masyarakat secara keseluruhan.

Untuk menyandingkan perspektif itu dengan pemahaman terhadap komunikasi politik politisi di luar panggung DPR pun dapat dengan jelas dilihat. Misalnya banyaknya kasus yang menimpa politisi DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota yang berhasil mengkomunikasikan kepentingan pribadinya dan melibatkan diri dalam korupsi berjamaah adalah bias yang sangat dekat dengan perspektif interaksi dilihat dari sebab akibat. Sehingga perspektif transaksi menjadi pilihan pula ketika kita melihat bahwa para politisi berkomunikasi berdasarkan apa yang dipikirkan, dirasakan dan apa yang dilakukan timbul dari makna yang diberikan oleh

orang lain kepada hal-hal fisik, sosial dan hal-hal yang abstrak. Makna apapun dari yang dikomunikasikan diturunkan melalui transaksi yang dimiliki orang dengan sesamanya.

Bagaimana komunikasi politik mengalir di DPR, sebaiknya juga dimulai dengan melihat model komunikasi politik seperti apa yang menjadi referensi para politisi dalam mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya dan dengan siapa mereka melakukan komunikasi politik tersebut. Menurut pengamatan peneliti dan berdasarkan hasil wawancara dengan para politisi tersebut, tidak ada satu model komunikasi politik teoritis apapun yang menjadi acuan bagi mereka dalam menggagas ide, pemikiran dan menyampaikannya sebagai pesan politik, sehingga komunikasi politik mengalir mengikuti irama dan tari dalam arti dialog apa, materinya apa dan siapa yang diajak berkomunikasi. ditandai dengan jarak terutama di wilayah depan. Dimana komposisi komunikator dan pelaku komunikasi lainnya adalah tetap, namun mempunyai identitas kepartaian, kepemimpinan serta menuntut umpan balik yang rasional, proporsional dan demokratis.

Menurut pengamatan peneliti, dengan asumsi itu sebenarnya para politisi dapat mengembangkan model komunikasi ini kearah model komunikasi yang bermakna, sebab, setiap proses komunikasi yang dilakukan di DPR, harus dapat memberi pembelajaran politik kepada masyarakat luas dan segenap struktur politik untuk melihat proses komunikasi politik bukan hanya dari sumber melainkan dari makna simbol (*content*) yang diperankan oleh sumber.

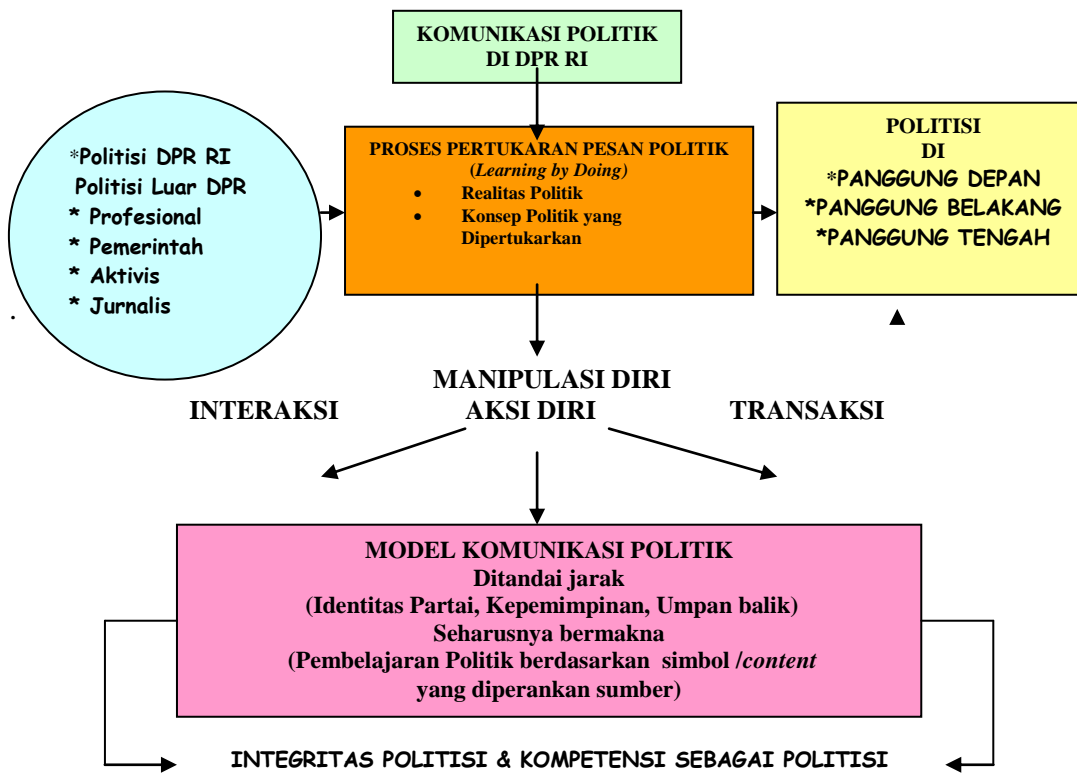
Jadi siapapun sumber itu, termasuk ketika enam kelompok yang manggung di DPR pun melakukan proses komunikasi politik itu, semuanya harus dapat menyisipinya dengan proses pembelajaran politik pula. terutama yang dapat diamati langsung oleh masyarakat dan memang harus dapat memberi pembelajaran politik kepada masyarakat. Oleh sebab itu pula, ketika melihat berbagai kategori kelompok yang berkomunikasi politik ke DPR maka akan dapat dilihat pula dampak langsung yang terjadi selama proses pertukaran pesan politik itu dilakukan.

Kelompok lain yang melakukan komunikasi politik di DPR adalah politisi yang bukan anggota DPR tetapi mereka berasal dari partai politik yang terpresentasikan di DPR, mereka mempunyai ikatan formal dan bisa bergerak di panggung belakang maupun panggung tengah dengan politisi di 'DPR', mereka bisa berada dalam konteks untuk mengendalikan fraksi. Hal inipun dapat memberi pembelajaran politik bagi tiap pelaku dan mereka yang mengamatinya. Jika diruntun dalam konteksnya, dalam pesannya dan dalam kapasitasnya, politisi lebih banyak menggunakan ketokohan mereka meski kadangkala mereka justru gagal menggunakan panggung politik DPR dan yang muncul malah kesan negatif. Inilah panggung politik DPR di mana politisi melakukan proses belajar politik dan berkomunikasi politik di dalamnya. Bagi mereka yang bisa duduk di DPR dengan tidak melalui proses rekrutmen yang memadai atau melalui proses rekrutmen dengan kriteria seleksi yang relatif longgar akan belajar dari realitas politik dan konsep politik yang terus dibicarakan di parlemen, sehingga masing-masing berusaha untuk menunjukkan kompetensi mereka sebagai politisi, terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi politik sekaligus peran politik mereka.

Kemampuan berkomunikasi politik bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, banyak kasus yang terjadi karena adanya kesalahan dalam berkomunikasi menimbulkan kekerasan. Perkelahian Aliman dan GBK, Mukrin dan Arya, Eldorado yang menaiki meja DPR merupakan ironi ketidakmampuan berkomunikasi politik. Belum lagi kasus yang melibatkan kategori lain dari pelaku komunikasi politik yang datang ke DPR. Jika itu terjadi pada politisi di DPR, mereka tidak menunjukkan progres dari kompetensi sebagai politisi maka akan menyangkut integritas di mata publik dan tetap seperti itu sampai akhir keanggotaannya,

bisa di tebak bahwa, sulit bagi mereka untuk kembali muncul sebagai wakil terpilih di Senayan. Mereka gagal melakukan komunikasi politik dalam ranah yang sangat terbatas sekalipun.

Gambar 15. Komunikasi Politik di DPR RI 1999-2004



Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian 2003-2004

Show dan Impression Management Politisi di Panggung politik DPR 1999-2004

Seperti yang diungkapkan filosof Friedrich Nietzsche (dalam Nimmo: 1993:53), bahwa politisi adalah aktor yang menciptakan citra ideal bagi diri mereka sendiri, citra adalah suatu integrasi mental yang halus dari berbagai sifat yang diproyeksikan orang itu, dipersepsi dan diinterpretasikan rakyat menurut kepercayaan, nilai dan pengharapan mereka. Tetapi kebanyakan politisi mendapatkan kesulitan besar untuk bisa dikenal dan mempunyai citra.

Apa yang diungkapkan Nietzsche, jika dicermati adalah sebuah keprihatinan, betapa ada nisbat yang tidak kecil antara upaya meraih citra melalui apa yang diproyeksikan oleh tiap politisi di panggung politik dengan perilaku polititisi itu sendiri yang dipersepsikan dan yang diinterpretasikan sesuai dengan harapan rakyat.

Preposisi lain yang terbangun dalam penelitian ini adalah ”**sebagian besar politisi melakukan impression management dalam hal ini manipulasi diri yang sangat kental dalam moment politik yang dipertukarkan dan disiarkan secara langsung. Satu hal lagi bahwa sepanjang penelitian dilakukan ternyata ditemukan pula bahwa “front stage pada satu politisi atau tim bisa merupakan back stage bagi politisi/tim lainnya. Apa yang terjadi di back stage bisa merupakan front stage bagi politisi lainnya”**. Untuk mengungkap preposisi diatas tentulah harus dikembalikan kepada sumber teori maupun pendekatan yang

menggagas penelitian ini dilakukan yakni pendekatan fenomenologi, interaksi simbolik dan dramaturgis dari Erving Goffman.

Istilah fenomenologi digunakan sebagai istilah generik untuk merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Tindakan sosial dilakukan politisi baik dalam hal interaksi, aksi diri, transaksi dan manipulasi diri sepanjang pementasan peran politiknya. Ketika politisi melakukan semua itu, aliran fenomenologi melihatnya dari dua sisi sebagai tipe yang berbeda dari tiap hubungan manusia :

1. *Pure relationship*, bahwa hubungan yang dilihat mangacu pada situasi dan hubungan diantara kawan-kawan dekat. Sehingga hubungan yang kelihatan dapat terjadi dengan akrab, manusiawi dan bersifat in-formal. Politisi dengan konstituen di daerah pemilihan dalam masa reses, di panggung belakang dengan teman se fraksi atau politisi lain diluar fraksi (politisi representasi partai politik di parlemen) ataupun di panggung tengah dengan berbagai kategori komunikator politik yang ada.
2. *They relationship*, mengacu pada hubungan antara birokrat dengan klien, politisi dengan masyarakat di panggung depan, dengan mitra kerja dengan kelompok kepentingan, di mana situasinya terlihat sangat rutin, metoda yang digunakan juga baku, kaku bahkan bisa jadi penuh *stereotipe*.

Ketika pesan politik dikomunikasikan, maka baik objek formal maupun objek material dari komunikasi politik itu haruslah terdapat dalam setiap unsur yang dikomunikasikan. Dilihat dari objek formal komunikasi politik yaitu dampak atau hasil yang bersifat politis (*political outcomes*) maupun proses penciptaan kebersamaan dalam makna (*the commonness in meaning*) tentang fakta dan peristiwa politik, serta objek materialnya berupa dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politis dari komunikasi maka apapun yang ditampilkan pada *front stage* bagi politisi maupun kelompok harus juga memenuhi kriteria itu.

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan melihat realitas secara langsung di panggung politik melalui pengamatan yang sangat panjang, peneliti menemukan bahwa seperti halnya komunikasi politik yang dipentaskan politisi yang dianggap sebagai suatu proses, maka realitas sosial dan hubungan politisi dalam interaksinya dengan kelompok komunikator politik lainnya adalah juga “sebuah proses” Artinya komunikasi politik di dalamnya adalah sebuah proses maka pembelajaran politik juga adalah proses, dan hubungan individu dan kelompok di dalamnya juga proses.

Sama seperti masyarakat lainnya, maka individu maupun kelompok politisi adalah sesuatu yang dinamis, tidak statis dogmatis yang kalau dikaji dari tiga premis dari teori interaksi simbolik bahwa; (i) Manusia bertindak berdasarkan makna (ii) makna tersebut di dapatkan dari interaksi dengan orang lain (iii) makna tersebut berkembang dan disempurnakan ketika interaksi tersebut berlangsung.

Pada panggung politik ada perpaduan yang sangat khas dan selaras ketika para politisi berinteraksi, ada batasan terhadap defenisi kebebasan mereka dengan apa yang didefenisikan oleh orang lain, maka terjadilah apa yang yang dinamakan *abstain*, *walk out* dari sidang dan sengaja tidak hadir untuk memberi kesan ketidak setujuan atas satu topik yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam suatu interaksi politik. Maupun manifestasi penciptaan dan pengembangan makna ketika mereka berinteraksi secara politis. Jadi, *walk out* juga adalah sebuah pesan atau simbol yang digunakan dalam komunikasi politik di DPR.

Sebagai politisi yang meskipun terikat kepada fraksi sebenarnya setiap politisi yang menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004 telah memberikan warna yang berbeda dibandingkan dengan warna komunikasi politik politisi sebelumnya di panggung politik DPR.

Ini juga preposisi menarik yang berhasil ditemukan dalam penelitian ini. Bagaimana politisi seperti Sulaiman, Eldorado, Jahirin dan Mukrin atau Aliman tampil memukau untuk membuang kesan bahwa mereka cuma bisa dalam lima hal saja (5D) yaitu datang, duduk diam, dengar dan duit. Nyaris tidak ada koor setuju dalam setiap rapat, sidang atau pertemuan lain di parlemen yang tidak dihujani perdebatan panjang sebelum mencapai kata sepakat. Meskipun kadangkala sikap itu harus dibayar mahal dengan tuduhan atau *stigmatisasi* yang diberikan oleh masyarakat bahwa mereka tengah memamerkan sebuah perilaku ala preman.

Ada kesan yang menarik ketika mereka melihat diri mereka sendiri sebagai pribadi maupun sebagai diri sosial beserta segala simbol yang melekat dalam kapasitas mereka tadi dengan mengasumsikan segala tindakan sosial mereka seolah-olah dicerminkan oleh manifestasi dan fungsi keterwakilan mereka di panggung politik. Ungkapan Jahirin yang merasakan sesuatu yang berbeda dalam masa keanggotaan dia di parlemen dibandingkan masa sebelumnya, atau Eldorado yang merasa bahwa diantara ratusan orang parlemen dialah yang paling sering tampil kepermukaan menemui massa maupun konstituennya. Gunadi yang merasa selalu berseberangan dengan fraksinya di panggung depan demi konstituennya, atau Aliman yang merasa belum sepenuhnya mampu berbuat meskipun telah berusaha maksimal berbuat, adalah bagian dari pengakuan politisi dalam melihat dirinya (*the self*) yang disebut Cooley sebagai *looking glass self*. Semuanya bermakna kepada bagaimana setiap politisi pada akhirnya memiliki *instink* untuk membawa mereka melewati setiap situasi sosial.

Hal ini tentu saja berbeda manakala kita menyaksikan berbagai perilaku politisi yang berindikasikan berbeda antara panggung depan dan panggung belakang serta panggung tengah. Sebab, meskipun teori interaksi simbolik menyatakan bahwa manusia dipandang sebagai pelaku, pelaksana pencipta dan pengarah bagi dirinya sendiri dengan jiwa dan semangat bebas, Maka sebagai politisi berarti mereka telah memilah kebebasan itu ke dalam wilayah aku (*the I*) dan saya (*Me*).

Pemilahan ini menurut pengamatan peneliti memang terjadi di panggung politik baik wilayah depan, tengah maupun belakang. Ketika politisi terlibat dalam suatu tindakan yang tidak direncanakan seperti misalnya kekerasan baik fisik maupun psikologis, maka sebenarnya ia tengah memerankan dirinya sebagai orang yang bebas dengan ke 'aku'annya (*the I*) dan dengan segala argumentasi itu ia akan mempertahankan prinsip ke-aku-an itu dalam batas toleransi yang bisa memadai bisa juga tidak. Akan tetapi ketika sebagai politisi ia bertindak sebagai saya (*Me*) maka ia telah memberikan konsep diri bagi dirinya sendiri (*the self*) sebagai *instink* untuk menjadikan dirinya terbiasa melewati situasi sosial tanpa harus mengubah tindakan dengan sesuatu yang tidak direncanakan sehingga kebiasaan itu dilakukan dengan argumentasi kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan simbol-simbol kebebasan yang ia miliki ia tidak hanya akan kadang-kadang saja kreatif tetapi akan terus kreatif, ia akan berubah secara konstan dan akan menyesuaikan diri secara kontan pula.

Menurut pengamatan peneliti, dikarenakan tiap politisi berada dalam suatu sistem simbolik yang sama, kebanyakan politisi agak kesulitan untuk menganalisis simbol, atau minimal kemampuan untuk menganalisis simbol itu menjadi terbatas. Sehingga masyarakat memberikan tolak ukur atas tindakan yang mereka lakukan. Artinya, tetap ada batasan kebebasan termasuk kreatifitas selama interaksi politik mereka lakukan.

Jadi, ketika peneliti menemukan suatu perilaku yang cenderung berbeda antara satu politisi dengan politisi lainnya, ternyata hal itu sangat terkait dengan situasi internal dan eksternal yang melingkupi politisi, mereka cenderung tidak memperhitungkan kontribusi pikiran dan keinginan untuk memecahkan masalah yang ada, termasuk masalah diluar pertimbangan masa lalu dan masa yang akan datang sehingga komunikasi yang mereka

lakukan juga menjadi tidak efektif. Itulah yang terjadi di panggung politik, sejumlah alasan dan pertimbangan termasuk proses yang dijalankannya sebelum dan setelah menjadi politisi kadangkala tidak lagi menjadi ukuran untuk mementaskan perilaku politik di ranah manapun secara *elegant* sehingga interaksi antara politisi dan konstituen sepertinya menjadi selesai ketika mereka terpilih dan menjalani hari-hari yang berbeda dari pada sebelum mereka menjadi anggota parlemen.

Bagian dari tindakan manusia menurut interaksi simbolik adalah pilihan dan merupakan proses kreatif yang bebas. Sejauh ini sangat sedikit pilihan yang bisa muncul dari kreativitas politisi meskipun itu menyangkut sejumlah hak sekalipun. Usulan RUU yang seyogianya berasal dari parlemen ternyata lebih banyak digagas pemerintah sehingga setika undang-undang itu di sahkan yang muncul adalah penolakan dari sebagian besar masyarakat yang merasa bahwa para wakilnya tidak memperjuangkan aspirasi mereka di parlemen.

Karena tindakan politisi umumnya juga bisa dilihat dari tindakan nyata dan tindakan tersembunyi, maka agak sulit membedakan kategori motif politisi ke parlemen dalam kapasitas motif untuk (*in-order-to*) atau motif karena (*because motive*), Ketika kita mengamati maksud, rencana, minat dan harapan mereka yang berorientasi ke masa depan kebanyakan memang membungkusnya di balik panggung dan di balik sikap politik yang tersembunyi. Ketika orientasi masa lalu dilihat sebagai sebuah alasan yang tertanam dari pengetahuan yang terendapkan dari politisi, secara nyata dapat dilihat dalam model perilaku politik yang mereka pentaskan.

Ada sejumlah model perilaku politisi yang sebelumnya berbeda menjadi sama dengan politisi lain sepertinya telah merubah motif untuk menjadi motif karena. Bukankah berubahnya penampilan politisi dengan sejumlah simbol yang menyertai perubahan itu juga telah mengindikasikan perubahan motif pula. Di sisi lain Goffman menyatakan bahwa dalam *impression management* perilaku manusia yang dapat diamati tidak hanya terbatas pada perilaku yang nyata saja sebab perilaku nyata manusia sebagai individu yang mengontrol situasi ternyata identitasnya berhubungan dengan defenisi sosial dimana ia terlibat. Itu sesuai dengan kekuatan analisis Goffman yang sangat mementingkan analisa interaksi manusia. Pendekatan ini bahkan mampu membongkar panggung politik sampai ke dalam situasi yang paling rumit sekalipun.

Kehadiran peneliti mengikuti subjek penelitian sampai mendekati ruang terbatas seperti kamar kecil, lobi hotel, ruang seminar dan transaksi di induk partai bahkan ketika mereka menjadi pembicara pada ajang seminar, lokakarya maupun ketika menjadi narasumber pada salah satu acara dialog interaktif dan siaran *live* di televisi, adalah juga dimaksudkan untuk melihat proses interaksi itu tidak hanya berdasarkan perkataan subjek melainkan juga berdasarkan perbuatan subjek. Dari sana pula peneliti menemukan kategori panggung tengah sebagai sebuah instrumen kompromistis yang terbangun dari keberadaan panggung depan dan panggung belakang. Esensinya secara khas panggung tengah ini memberi ruang pada politisi untuk tetap menggunakan simbol keanggotaannya sebagai politisi padahal jika dilihat dari ruang dan waktu sebenarnya politisi dapat melepaskan diri dari simbol itu.

Dari panggung tengah ini pula segala perilaku nyata dan yang tidak nyata di panggung depan dapat diamati, ditafsirkan dan diinterpretasikan. Model analisa utama Goffman dengan teori dramaturgisnya adalah bahwa tiap individu mengalami masalah dalam mengontrol kesan yang diberikan kepada orang lain dalam berbagai hubungan sosialnya. Individu berusaha mengontrol penampilannya, keadaan fisik dimana mereka memainkan perannya serta perilaku perannya yang aktif dengan isyarat yang menyertainya.

Setiap politisi di panggung politik depan, tengah maupun belakang nampaknya berupaya semaksimal mungkin mengontrol kesan yang diberikan kepada orang lain terhadap penampilan fisiknya. Hampir semua politisi mengenakan simbol fisik yang nyaris seragam dalam hal pakaian yang berjas dan berdasi lengkap di tiap momen pertukaran pesan politik serta Pin keanggotaan yang tidak pernah lepas menempel dari baju kebesaran itu maka muncul pula preposisi lain yang berhasil dibangun dari penelitian ini bahwa **“Busana adalah sebuah atribut penting terutama dalam *front stage* bagi politisi dan menjadi obsesi politisi untuk mengemasnya dalam penampilan yang serba sempurna”**.

Kesan yang ingin diberikan kepada orang lain tersebut berlangsung terus dimanapun mereka berada, tidak hanya di panggung depan. Di panggung tengah maupun belakang sekalipun. Bahkan apa yang peneliti jumpai di bandara ketika menyaksikan bahwa di hari liburpun seorang anggota DPR mengenakan pin itu dalam perjalanan dari bandara menuju ke daerah asalnya seperti yang disebutkan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan bagi peneliti, apakah tidak lebih baik jika Pin itu dikenakan saja ketika dia telah sampai di daerah tujuannya. Inilah realitasnya, bahwa simbol itu begitu bermakna bagi upaya politisi untuk meng'idealisir' kesan yang ditimbulkan oleh orang lain atas dirinya.

Kontrol atas kesan yang ingin diberikan oleh orang lain tersebut tidak hanya berhenti sebatas penampilan fisik, perilaku atas peran yang aktif serta isyarat yang menyertai peran itu jauh lebih memukau. Peneliti sering menyaksikan beberapa politisi dari rapat dan waktu yang berbeda berlari-lari kecil menuju kamar kecil diikuti oleh wartawan. Setelah itu secara tergesa-gesa wartawan itu keluar sambil memasukkan sesuatu kesaku celananya dan tersenyum penuh arti kepada peneliti. “Uang ya?” Tanya peneliti. Ia mengangguk.

Dalam kesempatan lain peneliti menyaksikan dan mengikuti seorang politisi sampai ke stasiun televisi nasional dimana ia akan menjadi nara sumber dalam suatu siaran dialog interaktif yang disiarkan secara langsung. Peneliti berbincang-bincang banyak dengan politisi tadi disela-sela waktu menunggu sebelum acara dimulai, jeda sebentar dan dilanjutkan setelah siaran. Usai siaran ternyata ia menyelipkan beberapa lembar uang lima puluh ribuan ke dalam amplop kemudian diserahkan kepada sopir dari stasiun televisi yang menjemputnya. Politisi tadi ternyata menurut pengakuan beberapa wartawan yang seringkali nongkrong di DPR bersama peneliti, dia adalah seorang nara sumber yang baik, tidak pelit (dalam hal keuangan) dan informatif.

Gambaran ini jika dikaitkan dengan teori Goffman yang menganggap individu (bukan satuan yang lebih besar) sebagai satuan analisis akan memberikan indikator bagi setiap orang yang mengamati perilaku politisi di panggung politik. Tanpa bermaksud menggeneralisasikan perilaku itu sebagai perilaku politik politisi. Tetapi karena Goffman juga sangat mementingkan adanya interaksi tatap muka dan kehadiran bersama (*co presence*) maka : “biasanya terdapat suatu arena kegiatan yang terdiri dari serangkaian kegiatan individu-individu yang saling mempengaruhi tindakan mereka satu sama lain ketika mereka berhadapan secara fisik.” Goffman (1959:15).

Arena paling terbuka untuk mengamati individu politisi yang saling mempengaruhi pada awal mulanya adalah berasal dari pertemuan di induk partai dan fraksi sebagai panggung belakang. Baru kemudian di komisi dan paripurna atau rapat lain yang di gelar di DPR. Suasana di induk partai dan di fraksi hampir semua dibungkus oleh kesan subjektivitas politisi dari partai yang mengusungnya. Peneliti sempat merekam pidato seorang ketua partai yang jika dibandingkan dengan pidatonya ketika di sidang-sidang sangat bertolak belakang, bahkan peneliti menyelinap di barisan peserta rapat seolah-olah peneliti adalah bagian dari mereka hanya untuk mencari tahu apa yang tengah mereka bicarakan. Dari situlah peneliti

tahu bahwa ketika di komisi dan paripurnalah semua akan terkuak bahwa satu partai bisa berbeda pendapat dan ini adalah fenomena menarik yang dapat dikembangkan melalui kajian selanjutnya.

Berdasarkan hal itulah seperti juga yang menjadi analisa Goffman bahwa individu dapat menyajikan suatu pertunjukan (*show*) bagi orang lain akan tetapi kesan (*impression*) si pelaku terhadap pertunjukan itu biasanya berbeda-beda. Seorang bisa sangat yakin terhadap tindakan yang diperlihatkannya tetapi bisa juga bersikap sinis terhadap pertunjukkan itu. Jadi *show* yang berbeda dan *impression* yang berbeda antara satu panggung dengan panggung lainnya bisa jadi ditandai dan dikategorikan dengan pengkhianatan, amarah, dan bahkan kekerasan tergantung pada identitas sosial, makna dan defenisi situasi tersebut. Pada kasus Aliman dan GBK (akmarhum) bisa dilihat berbeda jika dibandingkan dengan kasus yang dialami Mukrin dan rekan se fraksinya.

Dramaturgi pada hakekatnya adalah mencari tahu tentang “**bagaimana**” sesuatu dilakukan bukan “**mengapa**” sesuatu dilakukan (Mulyana 2001:132). Oleh sebab itu maka setiap politisi pada dasarnya akan menampilkan sosok diri yang ideal sesuai dengan perannya. Sekuat tenaga mereka akan menyembunyikan fakta dan motif yang tidak sesuai dengan citra dirinya baik melalui penampilan (*appearance*) ataupun melalui gaya (*manner*) nya. Mereka yang berpenampilan fisik lengkap dengan atribut keanggotannya dan berkomunikasi secara jujur, percaya diri dianggap tengah mementaskan dua hal itu Semua memang nampak terjadi di panggung depan.

Di panggung tengah dan belakang, peran itu bisa bergeser seketika bahkan di sela rehat sidang panggung depan, panggung tengah bisa serta merta ada, sebuah ruang dimana politisi dapat mengendurkan dasinya, melepaskan jasnya dan dengan santai menyandarkan punggungnya ke kursi, bercengkerama dengan sesama politisi baik dari partai yang sama maupun yang berbeda ataupun dengan kumpulan orang lain yang berada di ruangan itu. Berbeda halnya jika momen politik yang berlangsung melibatkan sejumlah pendemo yang meminta bertemu dengan mereka maka panggung depan menjadi arena tidak hanya bagi politisi tapi juga dari kelompok yang datang ke gedung dewan tersebut.

Bagi Goffman, Mereka yang mementaskan diri dalam suatu pertunjukkan jarang sekali dilakukan secara sendirian, sementara para politisi yang mementaskan kegiatan rutin di panggung politik kadangkala bisa sendirian, ini point teori Goffman yang agak berbeda dengan hasil penelitian ini. Kecuali ini bisa terjadi di panggung politik wilayah depan, maka wilayah tengah dan belakang sangat di dominasi individualitas politisi terlepas apakah mereka bicara atas nama partai, fraksi, ataukah komisi maupun tidak. Bukti paling nyata adalah ketika seorang politisi bicara di forum resmi yang seolah-oleh mewakili komisi atau fraksinya ternyata besoknya muncul perdebatan bahwa fraksi atau komisinya tidak pernah membahas atau mengizinkan politisi tadi untuk bicara atas nama fraksi atau komisinya.

Bahkan beberapa elemen dasar dari pertunjukan tim yang digagas dalam teori Goffman ternyata tidak sepenuhnya bisa diidealisir ke dalam panggung politik yang melibatkan tim politisi. “ Saat suatu tim pertunjukkan sedang berjalan melalui tindakan yang menyimpang, setiap anggota tim memiliki kemampuan untuk meronggrong atau memberhentikan pertunjukkan itu. Setiap peserta tim harus mempercayai tindakan atau perilaku temannya, sedang temannya harus bersikap demikian kepadanya.” (Mulyana, 2003:14).

Apa yang terjadi ketika gerombolan anggota Fraksi Utusan Daerah diawal pementasan panggung politik setelah reformasi menyerbu ke panggung depan tanpa seorangpun yang mampu menghentikannya, lalu ketika Eldorado menaiki meja, menyerobot podium, bahkan ketika beberapa politisi menyerbu ke arah ketua rapat dalam beberapa sidang di DPR tanpa

seorangpun yang mampu mencegah, bahkan kalimat bijak malah bisa memprovokasi untuk makin merembet maju ke depan. Adalah pengingkaran atas teori Goffman yang paling nyata. Tidak ada istilah tim untuk asumsi politik yang diperdebatkan, di wilayah manapun itu. Preposisinya adalah bahwa **“lebih banyak *impression management* yang dilakukan individu politisi dari pada tim, pada tim nyaris tidak berlaku.”**

Bahkan untuk satu ketentuan yang bernama kebiasaan pun analisa Goffman nampaknya tidak berlaku sepenuhnya di panggung politik : “ Bila dihadapan penonton para anggota tim harus bekerja sama untuk mempertahankan suatu batasan situasi tertentu akan tetapi dihadapan sesama anggota tim kesan yang demikian sulit dipertahankan (Mulyana, 1991:14). Ternyata politisi dari tim yang sama bisa berbeda pendapat, dari tim yang berbeda malah bisa satu pendapat.

Ada satu pandangan tentang *social establishment* yang dikemukakan Goffman yang agak mendekati realita jika dikenakan untuk mengamati perilaku politisi dan komunikasi politik mereka. Ini diibaratkan sebuah sistem tertutup dimana para aktor politik hendaknya memperhatikan pertunjukan yang mereka lakukan tanpa mempertimbangkan arti penting lembaga lain atas pertunjukan itu. Namun menurut peneliti justru pandangan ini baru dapat disarankan kepada para politisi yang makin hari makin garang saja.

Akan tetapi, ada satu model analisis dari Goffman yang bisa diterapkan dalam menganalisis perilaku politisi: Seorang pelaku harus dapat memainkan karakter bila terjadi krisis atau situasi gawat, “demi menyelamatkan pertunjukan’ dia harus memiliki atribut-atribut tertentu baik dalam hal langkah bertahan oleh si pelaku ataupun langkah yang diambil si penonton untuk membantu pelaku dalam menyelamatkan pertunjukan, serta langkah yang dapat diambil oleh penonton maupun pelaku untuk menggunakan langkah pencegahan demi kepentingan pelaku”. Inilah yang nampaknya nyaris selalu terjadi di panggung politik.

Apa yang menimpa Gus Dur menjelang dikeluarkannya memorandum pertama dan kedua menjelang digelarnya sidang istimewa untuk menurunkan GusDur serta bagaimana sejumlah kebijakan Megawati yang kemudian menjadi presiden ditentang oleh mereka yang bukan berasal dari fraksinya, atau bahkan sebagai perbandingan bahwa fenomena politik semacam ini akan terus ada sepanjang DPR ada. Hal ini juga bisa dilihat dari fenomena terbaru tentang bentrok fisik di DPR dalam menentang kebijakan SBY menaikkan harga BBM.

Nampaknya ini adalah fenomena politik yang selalu berulang. Upaya penyelamatan pertunjukkan politik tidak hanya oleh pelaku tapi juga oleh para penonton yang merupakan pendukungnya nampaknya akan terus berlangsung sepanjang sejarah parlemen karenanya setiap penguasa cenderung memperkuat barisan di parlemen agar berbagai kebijakannya dapat di dukung. Sebaliknya setiap politisi menginginkan akses yang maksimal ke pemerintahan dan berusaha tiap pertunjukkan dapat mereka kendalikan dari parlemen. Tidak heran para pejabat yang tengah menjabat membangun akses untuk dapat terpilih menjadi ketua partai politik dan mengendalikan partai politik melalui representasi partai politik mereka di parlemen.

Berdasarkan analisa Goffman bahwa tindakan sosial interaksi manusia dapat dianalisis berdasarkan orang-orangnya, hubungan sosialnya, pola penampilannya dan keadaan selebratif sosialnya, maka semua unsur itu dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung dalam kancah panggung politik di wilayah depan, tengah maupun belakang.

Sedangkan dalam interaksi komunikatif politisi, terutama pada penampilan yang secara sengaja mempergunakan arti faktual dalam komunikasi yang bersifat interpersonal, menentukan persepsi pengelolaan kesan mereka dalam mengkomunikasikan pesan-pesan politik. Jelas terlihat bahwa politisi sebagai komunikator politik dalam setiap tindakannya

sebagai persona stimuli telah bertindak sebagai subjek sekaligus objek di panggung politik, demikian juga pelaku komunikasi politik lainnya yang menyampaikan pesan-pesan politik mereka kepada anggota dewan di parlemen.

Ketika “peran” dan “watak” dipersatukan, dilihat dari pandangan Goffman yang menyatakan bahwa peran dan watak ditonjolkan melalui perilaku ekspresif yang disajikan merupakan diri yang dimanipulasi, perilaku yang bukan umum (tidak semestinya) berada di belakang layar dan sama sekali berbeda dari apa yang disajikan untuk umum, inilah yang relevan dengan preposisi yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa **konsep panggung depan dan panggung belakang menjadi kacau ketika dihadapkan pada panggung politik.**

Ternyata di panggung politik DPR, perilaku yang bukan umum tersajikan ke publik. Sesuatu yang berbeda di panggung belakang menjadi berbeda pula di panggung depan, terjadi kekacauan antara apa yang seharusnya terjadi di panggung belakang dengan apa yang kemudian terjadi di panggung depan. Atau bisa jadi sesuatu yang sama yang terjadi di panggung belakang terjadijuga di panggung depan.

Inilah fenomena panggung politik yang tidak sama dengan panggung teater drama lain yang mungkin lebih melankolis dibandingkan dengan skenario politik. Bukankah apa yang terjadi dengan Mukrin di panggung belakang dan tersajikan ke publik tanpa sensor apapun. Padahal itu adalah perilaku yang bukan umum yang seharusnya terjadi di belakang layar saja. Termasuk apa yang dialami oleh Aliman Jadi, **apa yang seharusnya terjadi di panggung depan yang menggambarkan kearifan di panggung belakang tidak akan pernah terjadi di DPR selama penyatuan dua kepentingan tidak dapat diwujudkan.** Seperti kata Jema: “Politik itu adalah perang tak berdarah, perang itu adalah politik berdarah.” atau seperti kata ESF bahwa:” Pada komunikasi politik di Indonesia, apa yang terjadi di wilayah belakang karena ketiadaan seleksi pesan maka cenderung terjadi di wilayah depan.”

Kedekatan Megawati dan Gus Dur yang bak kakak dan adik sebelum Gus Dur turun takhta adalah saksi bisu betapa sulit mempertemukan arti faktual komunikasi politik mereka yang terus saja bermusuhan (kecuali setelah Megawati tidak lagi menjadi presiden). Padahal Menurut Deddy Mulyana (1999: 87), “Dalam dunia politik terutama yang melibatkan elit politik pengelolaan kesan lebih dominan... sang aktor menggunakan bahasa verbal.” Seyogianya memang harus demikian, namun kini warna panggung politik bahkan diramaikan dengan bahasa verbal dan nonverbal. Politisi tidak hanya mengkomunikasikan pesan-pesan politik melalui permainan kata-kata yang canggih dan politis melainkan juga dengan bahasa tubuh dalam gerak cepat, otot yang kuat (bukan harus kekar) seperti kata AM: ”Politik sekarang harus menggunakan pistol dan sebagainya.”

Jadi, *impression management* politisi yang seharusnya dikemas sedemikian rupa sehingga dapat melambangkan kekuasaan otoritas atau atribut lainnya ternyata tanpa “citra diri” malah menjadi antagonis bagi penampilan politisi tersebut. Nyatanya apa yang dikutip Mulyana (201:106-107), bahwa inti dramaturgi adalah: “Menghubungkan tindakan dengan maknanya, alih-alih perilaku dengan determinannya.” Baik yang ekspresif dan impresif dari berbagai tindakan interaktif politisi sepanjang proses pertukaran pesan politik di DPR ternyata memang meliputi berbagai cara mereka dalam mengekspresikan diri dalam interaksi dengan pelaku komunikasi politik lain yang juga ekspresif.

Artinya meskipun para politisi membayangkan bagaimana mereka harus menampilkan diri bagi orang lain dan sekaligus membayangkan bagaimana penilaian orang lain terhadap penampilan mereka, mereka mengembangkan sejenis perasaan diri seperti kebanggaan namun ternyata diluar itu perasaan malu justru tidak terekspresifkan dalam komunikasi politik yang

mengandung muatan kekerasan. Selain itu tidak ada upaya untuk mempersepsi pikiran orang lain sebagai suatu gambaran persepsi tentang penampilannya, perilakunya, tujuannya, perbuatannya dan karakternya. Buktinya seorang kawan Eldorado se partai dan se fraksi malah menganggap Eldorado sarkastis dan literasi politik Eldorado dangkal ketika diminta tanggapannya mengenai perilaku Eldorado yang berteriak menaiki meja dan podium untuk menyampaikan pemikirannya di forum rapat. Padahal Eldorado dengan bangga menyatakan bahwa dialah yang paling dibangga-banggakan oleh konstituennya. Seorang Amran yang pernah menjadi calon presiden bahkan tidak mengetahui betapa orang-orang di bawahnya mencaci makinya dengan bahasa verbal yang sungguh tidak proporsional disampaikan.

Ketika peneliti menyaksikan betapa Sekretaris Jendral partai yang di pimpinnya harus lari melompati pagar kantor partai dalam sebuah rapat pendahuluan penyusunan daftar calon anggota legislatif menjelang pemilu 2004. Hal itu terjadi karena ia dikejar oleh anggota partai politik tersebut yang merasa suaranya tidak diakomodasi dalam rapat. Ini terjadi di panggung belakang dan tidak tersajikan ke publik, tetapi banyak kejadian lain yang mengandung muatan kekerasan meski di panggung belakang tersajikan ke publik. Kepemimpinan Akbar Tanjung yang terpecah menjadi dua kubu adalah ironi lain yang secara kasat mata tersajikan ke publik dan disiarkan televisi. Padahal menurut Deddy Mulyana (1999:90), "Pengelolaan kesan lewat televisi baik melalui pemberitaan, acara khusus atau bahkan iklan sangat penting. Karena televisi dapat melipatgandakan pengaruh *impression management* itu.

Oleh sebab itu pada kelompok yang tidak berusia panjang seperti politisi yang memang dibatasi perannya dari pemilu ke pemilu (kecuali bagi mereka dicalonkan dan yang terpilih kembali), mungkin analisis dramaturgi Goffman melalui *Encounter* nya dapat dipakai untuk menganalisis bagaimana politisi secara aktif dan kreatif mengendalikan kesan diri (*self*) melalui kesenjangan peranan yaitu ketika terjadi pemisahan yang jelas antara individu dengan peranannya dan keterikatan yang nyata antara individu dengan peranannya. Ini umumnya terjadi di panggung tengah yang bisa jadi ia menyajikan dirinya ke dalam situasi non kelembagaan, berdurasi singkat dan cenderung berhati-hati dalam mengendalikan kesan orang lain terhadap dirinya.

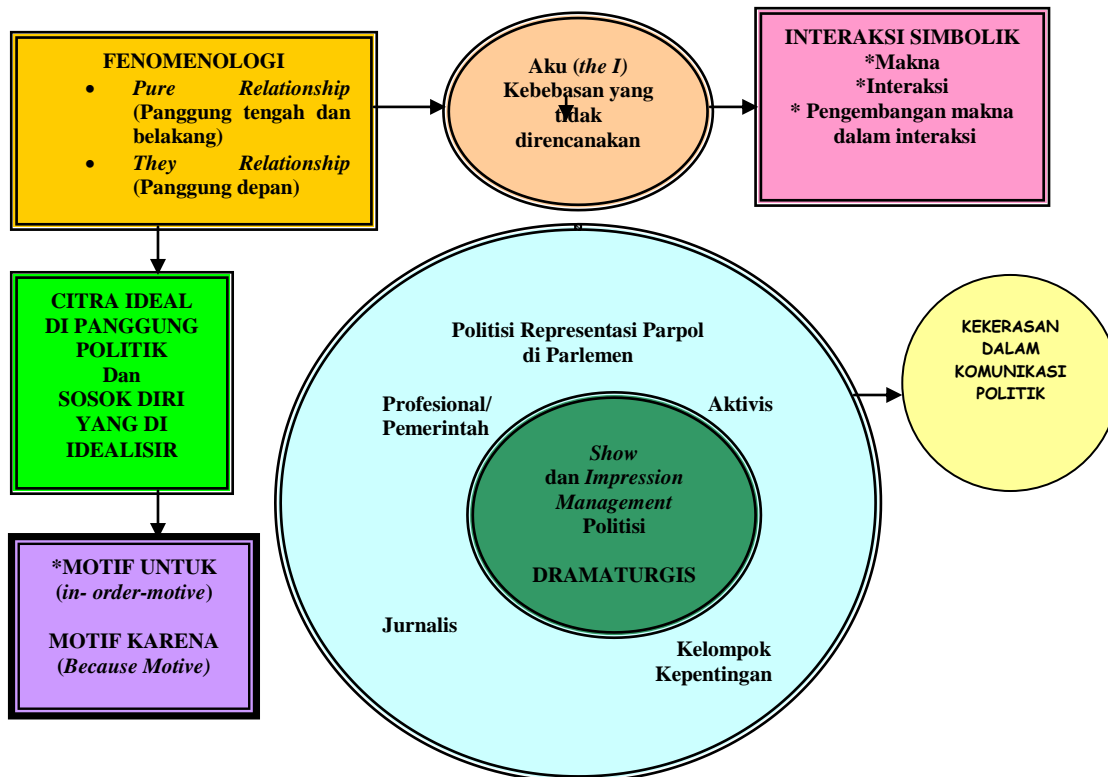
Ketika politisi dihadapkan pada situasi yang sarat perdebatan, argumentatif dan membutuhkan kreativitas berkomunikasi secara verbal, agak sulit bagi politisi yang memiliki stigma tertentu berargumentasi secara bebas. Meskipun ternyata tidak ada perbedaan antara politisi yang berasal dari partai politik yang secara ideologis berbeda, tetapi ada standar lain yang terlihat jelas bahwa politisi partai tertentu dengan partai lain yang diklasifikasikan memiliki anggota yang tidak memadai dalam proses perekrutannya, ternyata yang tampil adalah yang itu-itu saja. Tidak ada variasi yang juga standar terhadap pementasan politik anggota lainnya yang cenderung bungkam. Sama seperti yang diungkapkan Goffman (1974:13) bahwa, "Saat itulah kita dapat melihat kelemahan mereka masing-masing. Jadi yang diketengahkan bukan struktur pengalaman sosial melainkan struktur pengalaman individu dalam setiap kehidupan sosialnya.

Ketika kekerasan dalam komunikasi politik itu terjadi, baik karena ketidak mampuan politisi menjaga citra ideal dirinya, maupun karena standar kemampuan politiknya dan penampilan politiknya justru berkonotasi negatif dibandingkan dengan peran politik yang harus dimainkannya, maka kita juga dapat melihat dengan jelas. apakah penampilan itu sekedar canda, bersifat sementara atau hanya manipulasi diri saja semuanya dapat kita baca dengan norma dan aturan yang ada. Bahkan ketika politisi tidak belajar dari pengalaman yang berulang dan terulang, tidak mampu merubah ekspresi politik dan *self*-nya, seperti Eldorado yang mengatakan bahwa: "Saya kini bahkan dapat tersenyum dalam amarah, sesuatu yang

tidak dapat saya lakukan ketika pertama kali menjadi politisi.” Mungkin menjadi argumentasi yang mendukung pendapat Goffman bahwa: “*Self* bukanlah keseluruhan yang sebagian terlindung di balik peristiwa-peristiwa tetapi merupakan rumusan yang di saat itu dapat diubah untuk mengendalikan seseorang (1974:573).

Inilah gambaran umum yang berhasil ditemukan dalam mengkaji peristiwa dan pertukaran pesan politik yang dimainkan oleh aktor-aktor politik di panggung politik, sebagian berhasil mensejajarkan teori Goffman dengan fenomena penelitian yang dikaji, tapi sebagian lagi dari teori Goffman dapat dikembangkan dengan argumentasi yang berbeda dalam hal *impression management* politisi seperti yang digambarkan:

Gambar 16. Model *Show dan Impression Management* Politisi di Panggung Politik



Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian 2003-2004

Rekrutmen Politisi dan Fungsi Keterwakilan Politisi di Panggung Politik DPR 1999-2004

Apa yang terrepresentasikan pada situasi dan kondisi perpolitikan di tanah air menjelang proses pemilihan legislatif mulai dari anggota legislatif di tingkat kabupaten dan kota, propinsi bahkan pusat, kita mendengar, menyaksikan, merasakan dan mengetahui bahwa ada banyak proses rekrutmen legislatif yang jauh dari sekedar sistem Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bahkan melebihi batas etika dan moral politik itu sendiri.

Berapa banyak kasus ijazah palsu yang menyeruak ke permukaan yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dari berbagai partai peserta pemilu yang ternyata lolos. Tidak peduli apakah itu berasal dari partai besar dengan basis massa yang kuat ataukah partai politik gurem

sekalipun. Anehnya, mereka lolos, diletakkan di nomor urut jadi, bahkan menjadi calon anggota legislatif untuk untuk periode berikutnya. Kenyataan ini juga diperkuat dengan apa yang dikemukakan oleh Affan Gaffar, (2002:279), bahwa Dikalangan masyarakat terutama generasi muda yang mempunyai tingkat kesadaran politik yang tinggi, ada sinisme yang kuat sekali terhadap proses rekrutmen politik. Bahkan muncul istilah AMPI tentang banyaknya anggota legislatif yang berasal dari kalangan keluarga pejabat. Kenyataan tersebut menimbulkan interpretasi yang bervariasi di masyarakat, Apa hubungan model rekrutmen tersebut dengan kualitas lembaga perwakilan rakyat di Indonesia.

Pertanyaan Gaffar menjadi penting untuk dikaji jauh lebih dan dihubungkan dengan hasil penelitian ini mengingat kualitas lembaga perwakilan akan berkaitan langsung dengan kualitas politisi yang menjalankan fungsi keterwakilan di lembaga perwakilan tersebut. Menariknya lagi bahwa proses politik yang dilalui para anggota legislatif di DPR RI periode 1999-2004 sebelum duduk di parlemen adalah dimulai sejak proses transisi pada pemilu 1997. Sebagian besar kemudian duduk kembali sebagai anggota legislatif 1999-2004. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ungkapkan prihatin yang dinyatakan oleh Sungkono yang juga anggota DPR RI;

Mayoritas kita yang anggota DPR ini mungkin mewakili rakyat yang sebenarnya dalam arti yang malas, yang preman dan yang korup, sehingga memang mayoritas kita begitu. Mungkin proses politik yang brengsek ini harus jalan. Sekarang ini DPR lebih gila. Kalau dulu orang korup ya korup tapi orang mau beli mobil mewah perlu waktu 10-20 tahun. Sekarang baru 5 tahun sudah beli Jaquar, bagaimana?

Sekedar memberi alibi, alih-alih mempresentasikan pandangan dan asumsi yang terlanjur berkembang di masyarakat bahwa sebagian besar calon anggota legislatif peserta pemilu dari partai tertentu pada saat itu merekrut sejumlah anggota partai dan calegnya melalui pencomotan yang tidak sebagaimana mestinya, maka ada baiknya juga disimak apa yang diketengahkan Sonata berikut ini:

PDIP itu penuh dengan orang-orang yang tertindas, kader-kader PDIP adalah orang-orang yang hidupnya susah secara materi dan segalanya. Pada waktu itu, orang-orang pintar, kader-kader bangsa yang berkualitas terkooptasi di Golkar baik karena keyakinan tetapi lebih banyak karena kondisi yang ada pada saat itu di mana kalau ingin eksis mereka harus ke Golkar. Di PDIP yang ada adalah tukang las, tukang becak dan penjual koran.

Tukang las, tukang becak, tukang sepatu dan penjual koran itu memang kemudian banyak yang menjadi anggota legislatif di beberapa daerah. Tetapi untuk kasus DPR RI masalahnya bukanlah dari siapa dan dimana mereka direkrut yang menjadi persoalannya adalah bagaimana mereka direkrut? Problem ini tentu terkait dengan kapasitas keterwakilan mereka untuk menjadi anggota parlemen, sebab literasi politik yang luas serta tingkat elegant politik yang mumpuni juga dibutuhkan untuk bertarung secara sehat dan berkomunikasi secara politis di panggung politik.

Pola rekrutmen mempengaruhi juga gaya, penampilan dan bagaimana politisi melakukan *impression management* di panggung politik Lukmono menyatakan:

Pola rekrutmen sangat menentukan seseorang berkiprah dalam politik. Karena itu dalam pemilu 2004 dengan belajar banyak pada pemilu sebelumnya PDIP melakukan rekrutmen dari bawah terhadap orang yang dikenal. Ada dua hal yang kami yakini bahwa ada pemimpin yang dilahirkan dengan bakat, ada juga dengan belajar. Yang lahir dengan bakat biasanya dengan mudah menyesuaikan kemampuannya ketika dia menjadi politisi. Tetapi, ada juga yang dididik untuk menjadi politisi karena faktor pendidikan biasanya ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaktualisasikan diri di bidang politik tapi ini

akan menjadi pemain yang lebih panjang. Waktu terlibat dipartai lebih panjang, karena orang seperti ini lebih rasional. Pada kelompok yang lebih emosional loyalitasnya lebih tinggi tetapi ketika ia mengalami kekecewaan maka dalam bahasa jawanya ia akan menjadi “mutung” (pindah ke partai lain) (Wawancara Lukomono, Politisi DPR RI, November 2003).

Rasional dan emosionalitas politisi setidaknya juga ditentukan oleh kedewasaan sikap dalam berpolitik dan itu selayaknya dibangun dan terbangun sejak sebelum seseorang memutuskan untuk terjun ke politik praktis. Seperti yang juga di ketengahkan oleh Sulaiman politisi muda asal PKB berikut ini;

Dalam politik pasti ada kepentingan dan persaingan, setiap politisi me *manage* nya secara berbeda. Jadi tidak pada latar belakang kepartaian, tetapi lebih terletak pada individu dia direkrut dengan cara yang bagaimana, *track record* nya bagaimana dengan model apa ?

Direkrut dengan cara bagaimana dan *track record* yang bagaimana menjadi bagian dari pertanyaan tentang proses rekrutmen yang sangat penting, terutama ketika ada sinisme seperti yang diungkapkan Gaffar sebelumnya dan opini publik yang bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan politisi dianggap tidak selalu cukup memadai untuk mempresentasikan diri sebagai wakil rakyat meskipun secara demokratis mereka menyandang kapasitas itu. Inilah juga sebetulnya yang menjadi problem utama mengapa kemudian banyak politisi yang menampilkan simbol keterwakilan itu dengan langgam dan gaya serta penampilan fisik yang cukup mewah. Pakaian jas dan kemeja lengkap dengan dasi (PSL). Jaket khusus dan PSH adalah pakaian sehari-hari yang memberi simbol itu, plus PIN berlogo DPR RI yang menempel terus di bagian dada sebelah kiri meski hari libur sekalipun.

Belum lagi soal kendaraan, hampir semua lahan parkir di DPR terisi dengan mobil mewah, bahkan Pengamanan Dalam (Pamdal) di DPR yang berfungsi ganda selain sebagai Satpam di DPR justru nyaris menjadi seperti pelayan anggota DPR, seringkali peneliti melihat bahwa sang Pamdal tadi membukakan dan menutup pintu mobil politisi ketika politisi tadi datang dan pergi dari DPR, imbalannya adalah gumpakan uang ke tangan si Pamdal tersebut. Artinya rekrutmen tanpa meretokrasi pada akhirnya menyebabkan politisi terpilih cenderung melakukan *impression management* yang berlebihan ketika harus melakukan pertukaran pesan politik.

Seperti yang telah diungkapkan dalam bagian penyajian data terdahulu bahwa kebanyakan politisi direkrut secara instan dan proses lain yang berbau KKN, baik karena kedekatan dengan ketua partai, politik uang, koncoisme dan sebagainya, adanya beberapa politisi dari daerah pemilihan tertentu yang notabene tidak dikenal oleh rakyat di daerah pemilihannya, seperti halnya Chairudin yang lahir dan berdomisili di Jakarta tapi mewakili daerah pemilihan tertentu bahkan ia tidak bisa berbahasa daerah tersebut. Datuk yang orang Jakarta tapi mewakili Sumbar sementara berbahasa Minangpun ia agak terbata-bata. Beberapa politisi DPR yang mewakili daerah pemilihan tertentu padahal ia berdomisili di daerah lain menjadikan fenomena proses perekrutan yang amburadul itu makin transparan pula untuk diamati.

Seyogianya politisi terpilih sejak menjadi caleg haruslah orang yang dikenal dan mengenal *platform* partai yang mengusungnya, karena itu ia harus juga mengenal dan dikenal oleh akar rumput partainya. Artinya, ia layak nya berasal dari kader partai yang tau benar perjuangan memperjuangkan dan menegakkan nama besar partainya, tentu saja dengan tanpa mengesampingkan faktor lain bahwa ia juga harus telah eksis di daerah pemilihan yang akan ia wakili dan ia punya komitmen terhadap kepentingan konstituennya. Dari banyak politisi yang mengungkapkan kontribusinya seperti apa, telah mencapai batas apa, kebanyakan memang merasakan telah berbuat maksimal untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya meskipun hasilnya belum terasa maksimal.

Penutup

Ketika ruang komunikasi dibuka antara terwakil dan yang mewakili maka minimal itu adalah babak pertama dari proses menjalankan fungsi keterwakilan dapat bersinonim langsung agar dapat di suarakan di lembaga perwakilan. Nyaris semua politisi menyatakan bahwa mereka melakukan hal itu dalam setiap kesempatan seperti Eldorado yang mengatakan dia setiap minggu pulang ke daerah pemilihannya dan Aliman yang membuka kantor perwakilan di daerahnya maupun Mukrin dan Sulaiman yang bahkan menyediakan waktu khusus setiap bulannya untuk konstituennya, mengapa fungsi keterwakilan itu nampaknya tidak jauh lebih efektif dari hari ke hari, bulan ke tahun, pemilu ke pemilu ? Seperti juga yang disinyalir banyak pengamat bahwa interaksi partai, politisi dan konstituen berakhir saat pemilu usai dan mereka terpilih ke parlemen.

Apa yang sebenarnya melekat dalam fungsi keterwakilan yang dijalankan politisi di parlemen seperti yang dinyatakan oleh Hassel dan Cheryl (e.d, 1997:127-133), telah terealisasi oleh politisi selama mereka melakukan proses pertukaran pesan politik di DPR. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan fungsi politisi sebagai pewakil di legislatif ternyata fungsi yang dinyatakan berdasarkan teori Hassel dan Cheryl yang mengemukakan dua teori berkaitan dengan fungsi keterwakilan politisi yaitu ; *imperative mandate theory* dimana para wakil dianggap sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. ternyata sulit menemukan bahwa wakil memang selalu memberi pandangan, bersikap dan bertindak sejalan dengan mandatnya pandangan wakil secara pribadi tidak diperkenankan untuk dipergunakan dalam kualifikasinya sebagai wakil.

Di sisi lain jika dilihat dari *Free mandate theory* bahwa wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangan tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil. Menurut pengamatan peneliti telah terealisasi dalam proses komunikasi politik politisi di DPR RI. Hal ini dapat diamati secara langsung ketika politisi menjalankan fungsi keterwakilan secara kelembagaan yang terkait dengan sejumlah hak yang mereka miliki sebagai politisi di DPR. Artinya fungsi itu melekat sebagai hak DPR bukan hak individual. Seperti yang dinyatakan pada hasil penelitian terdahulu bahwa ada sejumlah hak yang dimiliki oleh anggota DPR yang meliputi hak legislasi, hak anggaran dan hak pengawasan. Ke tiga hak itu direalisasikan melalui sejumlah hak untuk mengajukan RUU, perubahan RUU, interpelasi, angket, penyidikan mengajukan persetujuan dan pertimbangan jika ditentukan oleh perundang-undangan, menentukan anggaran DPR serta menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan, semuanya secara kelembagaan sudah dipenuhi kecuali untuk hak interpelasi.

Namun bukan hak kelembagaan yang menjadi fokus kajian ini, melainkan bagaimana politisi sebagai pewakil menjalankan fungsi sebagai terwakil dalam menyuarakan aspirasi terhadap rakyat yang mereka wakili. akan terlihat apabila dalam proses pembahasan hak kelembagaan yang melekat pada politisi tersebut diungkapkan dalam bahasa verbal yang memihak pada kepentingan terwakil.

Menurut peneliti, *imperative mandate* maupun *free mandate* sebenarnya dilakukan bersamaan oleh politisi, karena unsur individual yang mengemuka maka timbul akses atas informasi yang disampaikan selama proses pertukaran di wilayah depan baik melalui interaksi, aksi diri, transaksi dan manipulasi diri. Akses itulah yang diwacanakan sebagai sebuah penyimpangan, sebuah ironi dari simbol terhormat yang mereka sandang dan ketika fungsi keterwakilan itu di panggung tengah dan belakang, ada kombinasi suara yang mereka pertukarkan baik itu suara pribadi, kelompok dan yang mereka anggap sebagai suara konstituennya.

Inilah yang peneliti anggap sebagai kekuatan sekaligus kelemahan teori keterwakilan yang dijalankan. Artinya, teori itu disamping mempunyai kekuatan, juga menyimpan kelemahan. Sehingga memang diperlukan perpaduan model komunikasi politik melalui teori keterwakilan itu yang dapat menjamin aspek keterwakilan (*representativeness*) serta dapat

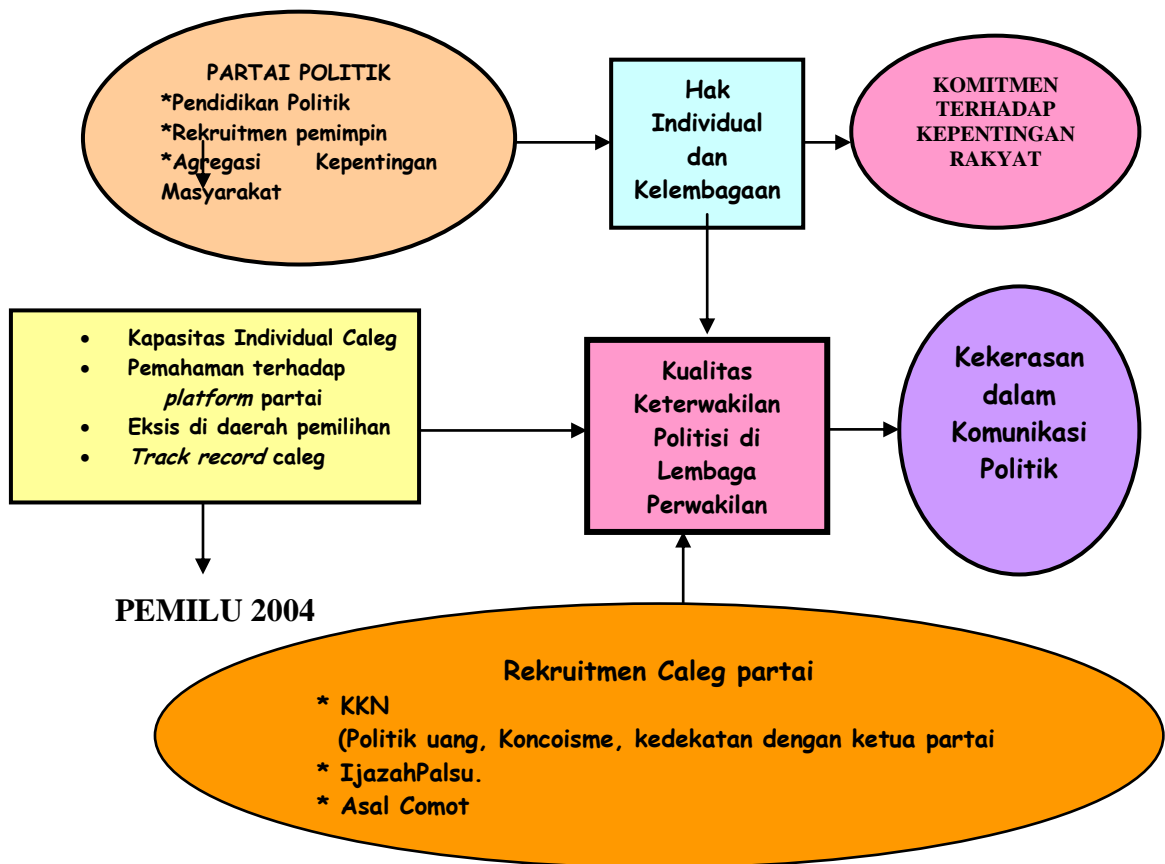
mewadahi akuntabilitas pewartu sehingga dapat mendekati realitas politik masyarakat yang memilihnya.

Asumsi itu bahkan bisa menjamin kualitas pewartu yang paling tidak akan terkait dengan sejumlah sistem yang digunakan dalam kerangka proses pertukaran pesan politik . Seperti yang diungkapkan Pitkin (dalam Arbi Sanit, 1998:24), “Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga dan proses –proses politik.”

Terwakili atau tidak tidak hanya dapat diukur dari kata-kata dan perbuatan politisi, tetapi juga dilihat dari apa yang diungkapkan dan dirasakan masyarakat dalam memahami dunia simbolik politisi baik di panggung depan, panggung tengah maupun panggung belakang serta bagaimana mereka mengapresiasi hak keterwakilan secara kelembagaan dengan kebijakan dan keputusan politik yang menyentuh keinginan, rasa keadilan dan harapan masyarakat yang memberikan hak keterwakilan kepada mereka.

Ukuran itu hanya dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi konstituen mereka. Apakah interaksi antara wakil dan yang diwakili menjadi selesai ketika mereka terpilih menjadi terwakili, apakah sang terwakili tidak meneruskan interaksinya untuk mencari tahu apakah yang harus diperjuangkannya ketika telah menikmati kursi parlemen, hal itu akan sangat terpulung kepada kredibilitas dan kapabilitas politisi mulai dari bagaimana kredibilitas dipertaruhkan saat ia direkrut mewakili partai dan daerah pemilihannya. Proses rekrutmen tersebut dapat di sederhanakan melalui model berikut ini:

Gambar 17. Proses Rekrutmen Politisi dan Fungsi Keterwakilan di Panggung Politik



Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian 2003-2004

Seperti yang diungkapkan oleh Dawam Raharjo (1999:23) :”Sebenarnya kekerasan bisa bersifat tidak langsung“. Kekerasan berbeda dengan konflik, kekerasan bisa terjadi dengan atau tanpa didahului dengan konflik, bisa terjadi oleh sesuatu sebab yang sepele, situasional, kadarnya bisa kuat maupun lemah, berlangsung lama dan menimbulkan kekekerasan lagi , kembali lagi, kekerasan lagi, seperti yang diungkapkan Dom Helder Camara (2000:31), “Ketika kekerasan mencoba melawan kekerasan, dipakai lagi kekerasan, logika kekerasan menyebabkan mereka memakai penyelesaian moral dan fisik, ini kekerasan lagi.”

Kekerasan memang seperti lingkaran setan yang sementara orang tidak tahu dimana harus memutusnya. Kekerasan terjadi dimana-mana dalam permainan anak kecil yang menggunakan pukulan terhadap lawan mainnya sampai pada ancaman orang-orang besar yang menggunakan pistolnya, menggunakan fisiknya untuk menunjukkan kekuatannya atau malah menunjukkan ketidakmampuannya untuk berargumentasi dan mengkomunikasikan pikiran dan kata-katanya.

Kekerasan di panggung politik tidak hanya terjadi di panggung politik resmi tetapi juga terjadi di panggung politik jalanan. Jika ada asumsi bahwa ketika terjadi kekerasan psikologis di tingkat elit maka otomatis akan terjadi kekerasan fisik juga di tingkat massa. Jadi, sebenarnya kita tidak dapat menutup mata dari kekerasan demi kekerasan yang terjadi. Dari kasus yang kecil, yang sedikit dapat membesar. Penelitian ini memang berangkat dari analisis yang bersifat induktif, mengkaji suatu kasus untuk mencari tahu ke kasus lainnya. Kekerasan yang satu yang memicu kekerasan lainnya, yang dianggap kecil tapi meraih opini yang beragam seperti halnya satu kasus kekerasan yang terjadi di DPR RI menjelang gelar pertama kegiatan dewan periode 1999-2004, kemudian di susul oleh kekerasan lain yang disinyalir sebagai premanisme politik.

Tanpa membawa sekeranjang asumsi, teori apalagi hipotesis penelitian ini telah berhasil mengungkap banyak hal berdasarkan pelakunya sendiri dan subjektivitas pelaku kemudian dicari kesepakatan intersubjektif dengan rekan, teman atau pimpinan pelaku serta beberapa pengamat politik dan aktivis yang mengamati sepak terjang pelaku komunikasi politik di DPR RI. Hasilnya adalah, bagaimana terjadi kekerasan dalam komunikasi politik di DPR RI yang semula diduga hanya terjadi satu atau dua kasus saja, ternyata berbeda dari apa yang dipikirkan oleh mereka yang tidak mengalami dengan mereka yang mengalami secara langsung proses pertukaran pesan politik di DPR RI. Termasuk bagi mereka yang mengalami apa yang diindikasikan sebagai kekerasan dalam komunikasi politik.

Menurut pengamatan peneliti, sangat mudah melihat berbagai kategori kekerasan fisik maupun psikologis yang tidak hanya terjadi di panggung politik DPR RI bahkan di DPRD pun kategori itu jelas kelihatan. Ketika beberapa politisi dengan yakinnya menyatakan bahwa mereka yang melakukan korupsi dan menekan eksekutif untuk menggoalkan kepentingan yang terkait dengan fungsinya itu juga bahkan sudah dianggap merupakan kekerasan psikologis. Ketika fraksi menekan anggotanya untuk bicara seragam di komisi dan paripurna sementara apa yang harus dikomunikasikan itu tidak sesuai dengan apa yang ingin mereka suarakan, maka itu juga sudah dianggap sebagai kekerasan.

Mungkin ini juga yang harus dilihat bahwa fenomena kekerasan dalam komunikasi politik baik fisik maupun psikologis disumbangkan juga oleh egosentrisme politik masing-masing kelompok, ketika egosentris itu bekerja, maka tidak ada evaluasi kritis dan kalkulatif, maka ukurannya bukan kekerasan atautah bukan kekerasan, melainkan perasaan terbela atau tidak terbela. Itulah yang ternyata lebih menonjol untuk dikomunikasikan.

Ketiadaan evaluasi kritis dan kalkulatif mungkin lebih dekat dengan upaya untuk menggagas adanya seleksi pesan. Sehingga setiap bentuk sikap dan ekspresi politik, kemauan

politik serta pikiran politik dapat diwujudkan ke dalam ekspresi verbal dan nonverbal yang memadai dilihat dari kedewasaan sikap berpolitik. Tetapi masalahnya menurut ESF adalah: “Persoalan kita di Indonesia pada masa reformasi adalah ketiadaan seleksi pesan dan belum ditandai dengan regulasi media yang *capable* untuk membuat komunikasi politik menjadi sehat. Akibatnya kekerasan menjadi bagian penting dalam komunikasi politik.”

Bagian penting kekerasan dalam komunikasi politik itu juga dapat diamati ketika beberapa politisi berbeda partai dengan ketua DPR kala itu mencaci maki ketua DPR baik secara langsung maupun melalui media karena sang ketua yang diindikasikan terlibat korupsi. Tidak ada seleksi pesan, tidak ada regulasi media yang kemudian memicu tanggapan yang sama kerasnya dari kelompok yang merasa dihujat. Sekali lagi egosentrisme kelompok melawan kekerasan itu dengan kekerasan pula. Ketika seorang mengatakan kepada Akbar Tanjung dengan kalimat: “Anda ngomong banyak, hidung aja segede gitu,” itu juga sudah termasuk kekerasan karena konteks yang dibicarakan tidak lagi proporsional. Jadi regulasi media juga belum terbangun. Padahal jika regulasi media telah terbangun, maka kekerasan juga akan terlembagakan. Seperti kata ESF; “Demokrasi itu adalah pelembagaan institusionalisasi konflik, konflik itu salah satu unsurnya adalah kekerasan, intinya dalam komunikasi politik jika regulasi media telah berjalan maka kekerasan bisa menjadi sesuatu yang bisa di tolerir.

Panggung politik DPR menyimpan sebuah rahasia politik yang bukan merupakan rahasia, ini mungkin sebuah ironi bagi mereka dengan *labelling* sebagai wakil rakyat yang terhormat. Bahkan, yang menjadi pertanyaan sekaligus fenomena ini akhirnya menunjukkan bahwa dalam komunikasi politik ternyata pesan politisi itu bisa dimaknai berbeda oleh politisi dari fraksi atau partai yang sama, tetapi dari partai yang berbeda bisa jadi di maknai sama. Kesaamaan dan ketidaksamaan itu bahkan bisa pula memicu kekerasan, bahasa yang tajam, kasar dan penuh *stereotipe* dari mereka yang masih memiliki kosakata politik yang belum mumpuni menyebabkan pihak lain yang diajak berkomunikasi juga menganggap apa yang disampaikan satu pihak sebagai isyarat yang menantang bagi pihak lain.

Secara kultural masyarakat kita memang sangat paternalistik. Jika pimpinan partai terganggu maka pada tingkat bawah akan melakukan perlawanan, inilah yang terjadi saat ini, bahwa kita masih berada pada tahap itu, banyak hal yang mempengaruhi perilaku politik politisi di panggung politik. Bahkan terhadap sesama politisi sekalipun. Ada politisi yang dalam mengekspresikan pikiran-pikirannya sehingga menimbulkan, ketidakpuasan, kemarahan yang mula-mula dilampiaskan dalam bentuk kata-kata yang *vulgar*, jauh dari sopan santun politik. Kalau kata-kata itu bernada kekerasan yang terus menerus disampaikan maka lama kelamaan akan terjadi *verbalisasi* yang dalam bentuk internalisasi tindakan politik dari kata-kata.

Barangkali memang setiap proses politik itu harus ditempuh dengan cara damai, seperti di DPR misalnya dalam banyak pertemuan politik yang berhasil diamati ketika membicarakan sesuatu yang harus dibahas bersama, sering timbul kata-kata keras meski pada akhirnya cenderung kompromis. Jadi sebenarnya jika kita ingin membangun demokrasi. Maka siapapun yang terlibat dalam komunikasi politik haruslah menjauhi kata-kata vulgar. Tidak hanya kata-kata vulgar yang menjadikan kekerasan dalam komunikasi politik itu menjadi seperti berantai, dalam politik, teror dan intimidasi juga merupakan kekerasan. Kekerasan dalam arti fisik menggunakan tekanan secara fisik untuk mencapai tujuan, bisa dengan menggunakan kekuatan yang secara formal, mempunyai senjata, ancaman dan intimidasi adalah kekerasan, meski potensial melanggar hukum tapi tidak kelihatan melanggar hukum, kekerasan ini mungkin saja digunakan politisi tetapi ini diluar cara-cara yang digunakan dalam demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Apter, E., David. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta : LP3ES.
- Aritonang, Baharuddin. 2004. *Dari Uang Rakyat Sampai Pasien Politik, Berbagai Kisah Anggota DPR*. Jakarta: Pustaka Pergaulan
- Amir, Piliang Yasraf. 2001. *Sebuah Dunia Yang Menakutkan, Mesin-Mesin Kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos*. Bandung: Mizan Pustaka
- API. 2001. *Panduan Parlemen Indonesia*. Jakarta: Yayasan API
- A.P. Sumarno. 1989. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arrianie, Lely. 1997. "Hubungan Cohesiveness dan Sumber Kekuasaan Dalam Kelompok dengan Sikap Terhadap Tingkah Laku Anti Sosial Anggota Kelompok Preman". Bandung : Tesis Pascasarjana UNPAD
- Basrowi dan Sukidin. 2003. *Teori-teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Berger. L. Peter, Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES
- Bluhm, William T. 1981. *Theories of The Political System: Classics Of Political Thought and Modern Political Analysis*. (Third Edition). New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited
- Bodgan, Robert dan Taylor. J. Steven, (Terj. A Khozin Afandi). 1993. *Kualitatif, Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bungin, Burhan (editor). 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Camara, Dom Hekder. 2000. *Spiral Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-INSIST Press
- Chaffee, Steven H dan Albert R. Tim. 1982. *Political ommunication: Issues and Strategies for Research*. Colifornia: Sage Publication
- Craib, Ian. 1992. *Teori-Teori Sosial Modern; Dari Parsons Sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Pers
- De Fleur, Melvin L., dan Sandra Ball-Rokeach. 1989. *Theories of Mass Communication*. (Fifth Edition). London : Longman

- Denzin, Norman, K. dan Yvonna, S. Lincoln, (Editors). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London, New Delhi: SAGE Publication
- Deutscher, Irwin. 1973. *What We Say American Sociological*. Review 38
- Douglas.D. Jack (Editor). 1970. *Understanding Everyday Life: Toward Reconstruction Of Sociological Knowledge*. Chicago: Aldine
- Fattah, Eep Saefullah. 1998. *Bangsa Saya Yang Menyebalkan*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- . 2000. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Fisher B., Aubrey. 1978. *Teori-Teori Komunikasi*. (Penyunting: Jalaluddin Rakhmat). Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- Filstead, J., William. 1971. *Qualitative Methodology: Firsthand Involvement With The Social Word*. Chicago: Markham Publishing Company
- Frey, R. Lawrence, et all. 1992. *Interpreting Communication Research, A Case Study Approach*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs
- Gaffar, Afan. 2002. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Geertz, Clifford, Michael Foucault, Jurgen Habermas, Charles Taylor and Richard Rorty. 2002. *Tafsir Politik*. Yogyakarta: Qalam.
- Gidden, Anthony, (Terj. Adi Loka Sujono). 2004. *The Constitution of Society, The Out Line of the Theory of Strucuration*. California-Malang: Mark Poster, University of Colifornia dan Pedati
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Garden City, N.Y.: Doubleday Anchor
- Golding, Peter, Graham Murdock, dan Philip Schlesinger. 1986. *Communicating Politics, Mass Communications and the Political Process*. USA: Leicester University Press
- Hassel, Graham and Cheryl Saunder (e.d). 1997. *The People's Representatives Electoral System in The Asia Pasipic Region*. Australia: Allen and Unwin Pty Ltd
- Kaid and Sander. 1976. *Political Communication, Theory and Research: An Overview*. Linnet Book
- Kuper, Jessica dan Adam Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Lloyd, Christopher (e.d). 1986. *Teori Sosial dan Praktek Politik*. Jakarta :Rajawali Press
- LP3ES. 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES
- Magnis, Frans Suseno. 2001. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Manan, Bagir. 2003. *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press
- Michael. 1980. *Qualitative Evaluation Methods*. Newburry Park. London. New Delhi: Sage Publications,
- Miles, B. Matthew, A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J, Lexi. 1999. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 1999. *Nuansa-Nuansa Komunikasi, Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- . 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- . 2004. *Komunikasi Efektif, Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- Musa, Ali Masykur. 1998. "Pemikiran Politik Nahdatul Ulama Periode 1987-1994 (Studi Tentang Paham Kebangsaan Indonesia). Thesis. Jakarta: UI
- . 2003. *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS), PSPP dan UNDP
- Nimmo, Dan, D. dan Keith R. Sanders. 1981. *Handbook Of Communication Science*. California: Sage Publication Inc
- Nimmo, Dan, James E. Combs. 1994. *Propaganda Baru, Kediktatoran Perundingan Dalam Politik Masa Kini*, Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- . 2000. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya
- Nurhasim, Mochammad (editor). 2001. *Kualitas Keterwakilan Legislatif, Kasus Sumbar, Jateng, Jatim, Sulsel*. Jakarta : Pusat Penelitian Politik LIPI.

- Nusa Bhakti, Ikrar dan Riza Sihbudi (Editor). 2001. *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, Jakarta: LIPI, Kronik Indonesia Baru dan The Ford Foundation.
- Paloma. M. Margaret. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Patricia, M. Golden. 1976. *The Research Experience*. F.E. Boston: Peacock Publishers, Inc, Itasca, Illinois, Northeastern University
- Paul, Johnson Doyle, (Buku I). 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Terj.) Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , (Buku II). 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Terj.) Robert. MZ. Lawang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Quinn, Michael. Patton. 1990. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. London-New Delhi: Sage Publications, International Education and Professional Publisher, Thousand Oaks.
- Tim Peneliti PSHK. 2000. “**Semua Harus Terwakili, Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia.**” Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Tim Peneliti LIPI. 2001. *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*. Jakarta: LIPI, Mizan Pustaka dan Kronik Indonesia Baru.
- Tim Peneliti PPW-LIPI. 1998. *Kekerasan Massa, Faktor Penyebab dan Penyelesaiannya*. Jakarta: LIPI
- Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Rauf, Maswadi, Mappa Nasrun. 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sastroadmodjo, Sudijono. 1998. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press,
- Simanjuntak, Togi. (Editor). 2000. **Premanisme Politik**. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Suprpto, Riyadi. 2001. *Interaksionisme Simbolik*. Malang: Averroes Press
- Suwardi, Harsono. 1995. *Diktat Komunikasi Politik*. Jakarta: Pascasarjana UI
- Thaib, Dahlan. 1999. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Tubbs, L. Stewart dan Sylvia Moss. 1996. *Human Communication; Prinsip-Prinsip Dasar (Buku I)*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya

- , 2000. *Human Communication; Konteks-Konteks Komunikasi (Buku II)*. Bandung: PT. Remadja Rosdakarya.
- Uchajana, Onong. Effendy. 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ummatin, Khoiro. 2002. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Veeger. K.J. 1993. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Winangsih, Syam Nina. 2002. "Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi dan Pergeseran Paradigma Komunikasi Pembangunan dalam Era Globalisasi". Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Komunikasi Fikom UNPAD Bandung.
- Windlesham, Lord. 1972. *What Is Political Communication*. in K.J. McGarry. *Mass Communication*. Clive Bingley: Linnet Books
- Yin. K. Robert. 1989. *Case Study Research, Design and Methods*. Newbury Park London-New Delhi: Sage Publications
- Yudha Triguna, IB, Gede. 1998. *Teori Tentang Simbol*. Bali: Widya Dharma
-